



**KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT POKDARWIS DEWA  
SERANG DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI SERANG  
DI DESA SERANG KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KABUPATEN BLITAR**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Widodo Eko Pambudi  
NIM 140910201037**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT POKDARWIS DEWA  
SERANG DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI SERANG  
DI DESA SERANG KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KABUPATEN BLITAR**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**Widodo Eko Pambudi**  
**NIM 140910201037**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ibunda Andriyani dan ayahanda Purwoko tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta barokah doanya;
2. adikku tersayang Faisal Ibnu Fatah dan keluarga besar di Blitar yang selalu memberikan dukungan serta doanya;
3. pengajar dan pendidik penulis dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga;

**HALAMAN MOTO**

Fa bi'ayyi aalaaa'i robbikumaa tukazzibaan  
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan”  
(terjemahan QS. Ar-Rahman 55: ayat 13)<sup>1</sup>

Tuhan menaruhmu di “tempatmu” yang sekarang, bukan karena “kebetulan”  
(Dahlan Iskan)<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Indonesia. <http://quran-id.com> [diakses tanggal 07 Juni 2018]

<sup>2</sup> Purnomo, Heri. 2012. Mutiara Kehidupan dari Seorang Dahlan Iskan. [https://www.kompasiana.com/heripurnomo/mutiara-kehidupan-dari-seorang-dahlan-iskan\\_551123948133119a36bc77ed](https://www.kompasiana.com/heripurnomo/mutiara-kehidupan-dari-seorang-dahlan-iskan_551123948133119a36bc77ed) [diakses tanggal 06 Juni 2018]

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Widodo Eko Pambudi

NIM : 140910201037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas Organisasi Masyarakat Pokdarwis Dewa Serang Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Serang Di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Juni 2018

Yang menyatakan,

Widodo Eko Pambudi  
NIM 140910201037

**HALAMAN PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT POKDARWIS DEWA  
SERANG DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI SERANG  
DI DESA SERANG KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KABUPATEN BLITAR**

Oleh:

Widodo Eko Pambudi

140910201037

Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D

Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kapasitas Organisasi Masyarakat Pokdarwis Dewa Serang Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar” karya Widodo Eko Pambudi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 18 Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Sutomo, M.Si  
NIP 196503211991031003

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP 196102131988021001

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP  
NIP 19740072000121001

Anggota I

Anggota II

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001

Dra. Inti Wasiati, MM  
NIP 195307311980022001

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kapasitas Organisasi Masyarakat Pokdarwis Dewa Serang Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Serang Di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar**; Widodo Eko Pambudi; 140910201037; 2018; xix+107 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perkembangan sektor kepariwisataan dalam beberapa kurun waktu terakhir menjadi salah satu rencana strategi oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan daerah. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih baik di sektor ekonomi maupun sektor-sektor lain. Pemerintah dalam pembangunan sektor pariwisata mulai memperhatikan peran atas keterlibatan masyarakat setempat sebagai aktor utama. Hal ini didasarkan atas pendekatan kepariwisataan berbasis masyarakat atau lebih *Community Based Tourism* (CBT). Pengembangan kepariwisataan dengan pendekatan CBT memaksa masyarakat untuk memiliki tingkat kapasitas yang baik. Kapasitas yang baik digunakan sebagai upaya untuk menjalankan proses manajemen kepariwisataan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi. Namun dalam kenyataannya seringkali dijumpai adanya keterbatasan kemampuan dari masyarakat dalam memaksimalkan pengelolaan terhadap sumber daya pariwisata. Dampaknya akan mempengaruhi manajemen pengembangan destinasi wisata yang lemah.

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di Pantai Serang yang bertempat di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Sesuai dengan perencanaan pemerintah, Pantai Serang dipromosikan menjadi destinasi unggulan Kabupaten Blitar dan sebagai penunjang perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Blitar Selatan. Pengelolaannya dijalankan oleh masyarakat setempat melalui kelompok-kelompok organisasi masyarakat seperti pokdarwis. Namun dalam manajemen pengembangan Pantai Serang sebagai destinasi wisata menunjukkan beberapa kekurangan yang terlihat dari penataan warung yang terkesan memadati area pantai, volume sampah yang meningkat, lengahnya



pelaksanaan tugas pengawasan dan keamanan pengunjung, kurangnya beberapa fasilitas penunjang dan perawatannya, serta daya dukung berupa perilaku masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada perolehan sumber data primer dan data sekunder. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kemampuan dari organisasi masyarakat di sektor pariwisata dalam memajemen pengembangan wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Fokus penelitian ini yaitu terkait kemampuan untuk mendirikan struktur organisasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan menjalin hubungan eksternal, kemampuan sumber daya dari organisasi, serta menggambarkan tentang implikasi atau dampak pengembangan wisata Pantai Serang terhadap masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif dengan mengacu dari model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya organisasi masyarakat yang dibentuk yaitu Pokdarwis Dewa Serang memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mengelola Pantai Serang. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen tinggi dari pokdarwis berserta masyarakat dalam mewujudkan aktivitas manajemen pengembangan wisata Pantai Serang. Komitmen tersebut diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kepariwisataan secara mandiri swadaya, menyediakan berbagai macam fasilitas penunjang wisata, menyelenggarakan event Serang Festival sebagai daya tarik wisata yang sekaligus sebagai upaya promosi. Namun dalam beberapa kegiatan, kemampuan daripada pokdarwis terkendala oleh beberapa faktor seperti keahlian secara teknis dalam pengelolaan dan pengaplikasian media promosi melalui media sosial, kurangnya sumber perolehan pendanaan, serta keterbatasan penyediaan fasilitas pendukung yang disebabkan oleh belum rampungnya proses kerjasama kepemilikan lahan.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Organisasi Masyarakat Pokdarwis Dewa Serang Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
3. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
4. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
6. Arinal Huda, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar dan Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos., MM. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar yang telah berkenan memberikannya ijin dan informasi dari pihak Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar;

7. Pemerintah Desa Serang, Kelompok Sadar Wisata “Dewa Serang”, Kelompok Kerja Pantai Serang, masyarakat setempat, dan juga para informan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan skripsi ini;
8. Ibunda Andriyani dan ayahanda Purwoko, serta adik tersayang Faisal Ibnu Fatah yang selalu memberikan dorongan doanya dan motivasi demi terselenggaranya penyusunan skripsi ini;
9. Veri Ikhwan Amir, Karomatul Afida, dan Muh. Fatikhun Nada yang telah bersedia menjadi rekan berdiskusi selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
10. Fina Alfiana, Dwi Noviana, Dwi Yoga Brillianto yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014, terimakasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini;
12. Seluruh anggota KEMAPATA (Keluarga Mahasiswa Panataran Blitar) di Jember yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Jember, 05 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                     | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                      | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                                       | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                                 | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....                               | <b>vi</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                 | <b>vii</b>     |
| <b>RINGKASAN</b> .....  | <b>viii</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....  | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>xii</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                       | <b>xv</b>      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                      | <b>xvii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                    | <b>xviii</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI</b> .....                        | <b>xix</b>     |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....                                 | <b>1</b>       |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....                                 | <b>1</b>       |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....                                | <b>10</b>      |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....                              | <b>11</b>      |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....                             | <b>11</b>      |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                            | <b>12</b>      |
| <b>2.1 Kosep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b> ..... | <b>12</b>      |
| <b>2.2 Pengelolaan Kepariwisataaan</b> .....                    | <b>15</b>      |
| 2.2.1 Pariwisata .....  | <b>15</b>      |
| 2.2.2 Daya Tarik Wisata.....                                    | <b>17</b>      |
| 2.2.3 Konsep Pengelolaan Kepariwisataaan .....                  | <b>18</b>      |
| 2.2.4 Keberhasilan Pengelolaan Pariwisata .....                 | <b>22</b>      |
| <b>2.3 Pariwisata Berbasis Masyarakat</b> .....                 | <b>23</b>      |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.1 Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat.....                                | 23        |
| 2.3.2 Prinsip-prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat.....                           | 26        |
| <b>2.4 Organisasi Masyarakat .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>2.5 Kapasitas Organisasi.....</b>  | <b>30</b> |
| 2.5.1 Kapasitas .....   | 30        |
| 2.5.2 Kapasitas Organisasi .....  | 32        |
| <b>2.6 Penelitian Terdahulu.....</b>  | <b>39</b> |
| <b>2.7 Kerangka Berpikir .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>42</b> |
| <b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>  | <b>43</b> |
| <b>3.3 Situasi Sosial.....</b>  | <b>44</b> |
| <b>3.4 Desain Penelitian .....</b>  | <b>44</b> |
| 3.4.1 Fokus Penelitian .....  | 45        |
| 3.4.2 Data dan Sumber Data .....  | 46        |
| 3.4.3 Penentuan Informan Penelitian .....   | 46        |
| <b>3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....</b>                                   | <b>48</b> |
| <b>3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data .....</b>                                      | <b>50</b> |
| <b>3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....</b>                                  | <b>52</b> |
| <b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Blitar .....</b>                             | <b>54</b> |
| 4.1.1 Keadaan Wilayah Kabupaten Blitar.....   | 54        |
| 4.1.2 Arah Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Blitar.....                        | 58        |
| 4.1.3 Profil Destinasi Wisata Pantai Serang.....                                    | 62        |
| <b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>   | <b>65</b> |
| 4.2.1 Pembentukan Struktural Organisasi Masyarakat Pokdarwis<br>“Dewa Serang” ..... | 66        |
| 4.2.2 Pelaksanaan Kepemimpinan dan Koordinasi.....                                  | 71        |
| 4.2.3 Upaya Menjalin Hubungan Kemitraan Eksternal .....                             | 72        |
| 4.2.4 Sumber Daya Dukung Organisasi .....   | 76        |

|   |            |
|---|------------|
| 4.2.5 Dampak Pengelolaan Pantai Serang Terhadap Kehidupan Masyarakat .....                          | 91         |
| <b>4.3 Analisis Hasil Penelitian.....</b>   | <b>93</b>  |
| 4.3.1 Analisis Kemampuan Pembentukan Struktural Organisasi Masyarakat Pokdarwis “Dewa Serang” ..... | 94         |
| 4.3.2 Analisis Kemampuan Pelaksanaan Kepemimpinan Dan Koordinasi.....                               | 95         |
| 4.3.3 Analisis Kemampuan Menjalin Hubungan Kemitraan Eksternal                                      | 97         |
| 4.3.4 Analisis Kemampuan Sumber Daya Dukung Organisasi .....  | 98         |
| 4.3.5 Analisis Dampak Pengelolaan Pantai Serang Terhadap Kehidupan Masyarakat .....                 | 103        |
| <b>BAB 5. PENUTUP.....</b>  | <b>105</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 105        |
| 5.2 Saran.....  | 105        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>108</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>112</b> |

**DAFTAR TABEL**

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 ..... | 2              |
| Tabel 1.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Blitar tahun 2016 .....          | 5              |
| Tabel 2.1 Tiga level mengukur kapasitas dalam organisasi .....                                 | 34             |
| Tabel 2.2 Komponen penelitian .....  | 38             |
| Tabel 2.3 Penelitian terdahulu .....   | 39             |
| Tabel 3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan .....   | 51             |
| Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kabupaten Blitar menurut kecamatan tahun 2015 .....                  | 56             |
| Tabel 4.2 Destinasi wisata Kabupaten Blitar .....  | 60             |
| Tabel 4.3 Regulasi Pemerintah Kabupaten Blitar tentang pembangunan kepariwisataan .....        | 62             |
| Tabel 4.4 Tupoksi struktur kelompok sadar wisata .....   | 67             |
| Tabel 4.5 Rencana pengembangan wisata oleh Pemerintah Desa Serang .....                        | 73             |
| Tabel 4.6 Pembangunan gapura masuk oleh Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar .....                | 73             |
| Tabel 4.7 Kemitraan pokdarwis dengan instansi pemerintah .....                                 | 74             |
| Tabel 4.8 Kemitraan pokdarwis dengan instansi non-pemerintah .....                             | 75             |
| Tabel 4.9 Data tingkat pendidikan per Bulan Januari 2014 .....                                 | 77             |
| Tabel 4.10 Bentuk pendanaan swadaya .....  | 79             |
| Tabel 4.11 Pembagian hasil tarif penataan kendaraan bermotor .....                             | 80             |
| Tabel 4.12 Rekapitulasi anggaran pokdarwis Dewa Serang tahun 2017 .....                        | 81             |
| Tabel 4.13 Fasilitas penunjang Kawasan Wisata Pantai Serang .....                              | 82             |
| Tabel 4.14 Rencana kerja Pokdarwis Dewa Serang .....   | 85             |
| Tabel 4.15 Bentuk pelayanan kepada wisatawan .....   | 87             |
| Tabel 4.16 Perkembangan Serang Festival .....  | 88             |
| Tabel 4.17 Jumlah usaha masyarakat di Kawasan Pantai Serang .....                              | 92             |
| Tabel 4.18 Pendapatan masyarakat sebelum (2013) setelah (2018)                                 |                |

pengembangan Pantai Serang ..... 93





## DAFTAR GAMBAR

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Gambar 1.1 Kunjungan wisatawan di Pantai Serang tahun 2011-2016 .....          | 9              |
| Gambar 2.1 Perbedaan pariwisata konvensional dan berbasis kerakyatan .....     | 24             |
| Gambar 2.2 Struktur organisasi pokdarwis .....                                 | 30             |
| Gambar 2.3 Level kapasitas .....   | 31             |
| Gambar 2.4 Elemen kapasitas inti .....   | 37             |
| Gambar 2.5 Kerangka berpikir .....   | 41             |
| Gambar 3.1 Model interkatif Miles dan Huberman (1994) .....                    | 53             |
| Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Blitar .....                                 | 55             |
| Gambar 4.2 Lokasi Pantai Serang Kabupaten Blitar .....                         | 63             |
| Gambar 4.3 Tiket masuk kawasan wisata Pantai Serang .....                      | 64             |
| Gambar 4.4 Serang Festival 2015 .....  | 65             |
| Gambar 4.5 Struktur organisasi Pokdarwis Dewa Serang .....                     | 66             |
| Gambar 4.6 Struktur organisasi kelompok kerja (Pokja) Pantai Serang .....      | 70             |
| Gambar 4.7 Pantai Serang dalam website D'Travellers .....                      | 83             |
| Gambar 4.8 Pantai Serang dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Blitar ..... | 84             |
| Gambar 4.9 Aplikasi Amazing Blitar .....                                       | 84             |
| Gambar 4.10 Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016-2017 .....      | 91             |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|             |  | <b>Halaman</b> |
|-------------|--|----------------|
| Lampiran 1  | Pedoman wawancara Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar .....                  | 113            |
| Lampiran 2  | Pedoman wawancara Pemerintah Desa Serang .....                             | 113            |
| Lampiran 3  | Pedoman wawancara Pengelola Kawasan Pantai Serang .....                    | 114            |
| Lampiran 4  | Pedoman wawancara Masyarakat Setempat .....                                | 114            |
| Lampiran 5  | Pedoman wawancara Pengunjung Pantai Serang .....                           | 115            |
| Lampiran 6  | Dokumen Perdes Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Desa Tahun 2014-2019 ..... | 116            |
| Lampiran 7  | Dokumen Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Serang .....                  | 131            |
| Lampiran 8  | Rekapitulasi anggaran Pokdarwis Dewa Serang .....                          | 134            |
| Lampiran 9  | Anggaran pembangunan gapura oleh Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar .....   | 138            |
| Lampiran 10 | Dokumentasi kondisi Wisata Pantai Serang .....                             | 141            |
| Lampiran 11 | Dokumentasi Wawancara .....  | 143            |

**DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI****Daftar Singkatan**

|            |   |
|------------|---|
| BKPH       | : Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan              |
| CBT        | : <i>Community Based Tourism</i>                |
| DAS        | : Daerah Aliran Sungai                          |
| EJEF       | : <i>East Java Ecotourism Forum</i>             |
| KPH        | : Kesatuan Pengelolaan Hutan                    |
| LMDH       | : Lembaga Masyarakat Desa Hutan                 |
| MTF        | : <i>Majapahit Travel Fair</i>                  |
| Parbudpora | : Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga     |
| PDRB       | : Produk Domestik Regional Bruto                |
| POKDARWIS  | : Kelompok Sadar Wisata                         |
| POKJA      | : Kelompok Kerja                                |
| POKMASWAS  | : Kelompok Masyarakat Pengawas                  |
| RIPPARDA   | : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah |
| UMKM       | : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah              |
| UNDP       | : <i>United Nations Development Programme</i>   |
| WPP        | : Wilayah Pengembangan Pariwisata               |

**Daftar Arti Notasi**

|   |          |
|---|----------|
| % | : Persen |
|---|----------|

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata saat ini menjadi suatu industri yang semakin populer untuk dikembangkan. Pembangunan destinasi wisata dianggap mampu untuk membantu mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional. Pengelolaan sumber daya secara baik sebagai objek wisata mampu untuk menarik minat kunjungan wisatawan serta mampu bersaing untuk memenuhi permintaan pasar wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan yang baik sangat disarankan untuk melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat perlu diimbangi dengan kapasitas yang memadai. Sehingga dengan kapasitas yang baik akan mampu untuk menciptakan sebuah daya tarik wisata unggulan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini membahas tentang konsep kepariwisataan dengan mendiskripsikan kapasitas organisasi masyarakat sebagai pengelola. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Fokus penelitian yaitu tentang kapasitas dari organisasi masyarakat sebagai pengelola destinasi wisata.

Penyelenggaraan pembangunan menjadi alternatif untuk menciptakan konsep pembaharuan bagi kepentingan publik di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan nasional. Fokus penyelenggaraan pembangunan kerap kali bertujuan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini membuat pemerintah untuk merumuskan alternatif-alternatif strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun secara keseluruhan, pemerintah tidak akan mampu untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan sendirian. Berubahnya paradigma pembungan nasional ke arah yang lebih demokratis dan didesentralisasikan, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan dari masyarakat. Sehingga hampir secara keseluruhan proyek pembangunan pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Korten (1990:87) menyatakan bahwa pembangunan sebagai proses di mana anggota

masyarakat meningkatkan kapasitas secara pribadi dan kelembagaan untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil dalam kualitas hidup mereka yang konsisten dengan aspirasi mereka sendiri.

Provinsi Jawa Timur dalam catatan badan pusat statistik (BPS) di tahun 2016 memiliki penduduk miskin sejumlah 4.638 orang. Menanggapi permasalahan tersebut, alternatif kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai memperhatikan sektor pariwisata. Sasaran pembangunan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, penerimaan devisa, mendorong pembangunan daerah, serta sebagai bentuk upaya mengenalkan potensi alam dan budaya daerah. Pengembangan sektor pariwisata mampu mempengaruhi sektor-sektor lain untuk berkembang. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan sektor pariwisata dalam menyumbang perolehan PDRB Jawa Timur serta penyerapan tenaga kerja. Berikut kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan peningkatan tenaga kerja Jawa Timur.

Tabel 1.1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016

| <b>Tahun</b> | <b>Jawa Timur<br/>(T Rp)</b> | <b>Pariwisata<br/>(T Rp)</b> | <b>Tenaga Kerja<br/>(orang)</b> |
|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>2012</b>  | 1.248,77                     | 61,01                        | 192.153                         |
| <b>2013</b>  | 1.382,43                     | 68,84                        | 194.479                         |
| <b>2014</b>  | 1.540,70                     | 81,01                        | 200.893                         |
| <b>2015</b>  | 1.689,88                     | 92,68                        | 208.629                         |
| <b>2016</b>  | 1.855,04                     | 106,27                       | 237.402                         |

Sumber: data diolah kebijakan pembangunan Disbudpar Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tahun 2016 kontribusi dari perolehan PDRB Pariwisata sebesar 106,27 trilyun rupiah atau meningkat 14,66% dari tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah penyerapan tenaga kerja turut mengalami peningkatan dengan rata-rata 5,26% per tahunnya. Sehingga sektor pariwisata dianggap mampu terintegrasi dengan program peningkatan di sektor ekonomi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan

masyarakat, menghapus kemiskinan, melestarikan alam dan lingkungan, serta memajukan kebudayaan.

Pengembangan sebuah kawasan sebagai destinasi wisata perlu kiranya untuk memperhatikan peran dari tiga aktor diantaranya yaitu wisatawan, bisnis pariwisata (swasta), dan masyarakat setempat. Wisatawan bertindak sebagai pihak penentu, karena pengembangan objek wisata seringkali mengikuti *trend* permintaan wisatawan. Kemudian pihak pemilik bisnis pariwisata berkontribusi sebagai pihak perantara untuk membantu promosi objek wisata. Sehingga bisnis pariwisata sebagai aktor yang mencari keuntungan dari wisatawan yang kemudian membantu dalam memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal. Sedangkan peran masyarakat setempat/lokal sebagai pihak pemberi pelayanan jasa dan melayani kebutuhan wisatawan. Selain itu juga sebagai penerima dampak langsung berupa keuntungan dari hasil pengeluaran konsumsi wisatawan.

Namun dalam beberapa kasus, pembangunan kepariwisataan disamping memberikan dampak positif, bukan tidak mungkin sektor pariwisata memberikan dampak negatif. Tidak jarang kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan pembangunan pariwisata justru membatasi ruang keterlibatan masyarakat setempat. Kepariwisataan yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah seringkali menimbulkan berbagai macam kritikan di kalangan masyarakat. Pengembangan pariwisata yang selalu dipresepsikan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian akan berdampak pada lahirnya kebijakan penanaman modal yang tinggi. Tentu pada pelaksanaannya hanya mampu dipenuhi oleh golongan tertentu seperti para investor kaya. Sehingga tidak menutup kemungkinan peran masyarakat setempat sebagai salah satu pihak yang berkepentingan menjadi terpinggirkan. Dampaknya akan berpotensi untuk mendorong munculnya konflik sosial serta perilaku menyimpang oleh masyarakat sebagai bentuk rasa kekecewaan dan ketidakpuasan.

Murphy dalam Sunaryo (2013:138) menyatakan bahwa kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat. Oleh karena itu, perkembangan pariwisata perlu diwujudkan dengan melibatkan peran langsung dari masyarakat khususnya yang bermukim di kawasan destinasi.

Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (Murdiastuti, dkk. 2014:89). Pendekatan *community based tourism* (CBT) memposisikan masyarakat sebagai aktor penting dalam konteks paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Keterlibatan masyarakat sebagai langkah yang bertujuan untuk mengimbangi dominasi peran dari swasta. Peran aktif dari masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pariwisata dengan sistem *bottom-up* yang artinya masyarakat sebagai penggagas dan pelaksana kegiatan untuk mewujudkan Sapta Pesona. Sedangkan peran pemerintah lebih pada upaya memberikan fasilitas misalnya akses pelatihan peningkatan kapasitas, distribusi kredit usaha, perencanaan bisnis, serta membantu pemasaran produk wisata.

Penyelenggaraan manajemen kepariwisataan perlu memperhatikan adanya pengembangan kelembagaan dan pengorganisasian masyarakat sebagai motor penggerak dalam mengelola sumber daya dan potensi wisata. Mengacu pada Permen Parwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan mencakup kelembagaan kepariwisataan baik pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia perlu untuk dikembangkan karena bertindak sebagai faktor penting pendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Noho (2014) menyatakan bahwa pengembangan potensi-potensi wisata perlu diimbangi dengan kemampuan atau kapasitas dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya termasuk masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa kemampuan individu maupun kelompok dalam masyarakat menjadi kunci untuk mengembangkan manajemen pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pembangunan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata perlu untuk mewujudkan sapta pesona yang terdiri dari unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Kawasan pantai yang dibangun sebagai objek wisata akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun non-fisik. Terlebih pembangunan pantai yang diikuti oleh perkembangan

aktivitas lain seperti penataan pemukiman masyarakat, wisata kuliner ikan laut, serta *camping ground*. Salah satu tempat yang menarik dan memadukan aktivitas-aktivitas tersebut yaitu Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar sebagai satu dari sekian kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam potensi sumber daya alam yang menakjubkan. Tentu ini menjadi peluang untuk dapat dikembangkan sebagai usaha pariwisata. Arah pembangunan mulai dilaksanakan dengan memperhatikan sektor pariwisata untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah melalui percepatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja baru. Pembangunan sektor pariwisata disesuaikan dengan arah pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 sebagai strategi mencapai peningkatan aspek sosial ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Pembangunan diharapkan tidak hanya terjadi perubahan pada aspek fisik dan ekonomi, namun juga pada taraf kehidupan, kondisi sosial budaya, ketenagakerjaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 1.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Blitar tahun 2016

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                     | Kinerja |           |             |
|---|---|---------|-----------|-------------|
|   |   | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB           | 17,08   | 17,35     | 101,58      |
|   | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB              | 13,04   | 12,90     | 98,92       |
|   | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB             | 35,75   | 35,41     | 99,04       |
|   | Prosentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata (%) | 1,7     | 1,14      | 91,2        |

Sumber: data diolah laporan kinerja pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, target pembangunan pemerintah Kabupaten Blitar masih terfokus pada sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Prosentase sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD sebesar 1,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,2%. Namun, tercatat bahwa PAD dari sektor



pariwisata meningkat sebesar 63,7% atau sebesar Rp 2.549.656.000,00 dari tahun 2015 yang sebesar Rp 1.557.115.000,00. Dikarenakan berdasarkan catatan Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar terjadi peningkatan volume kunjungan wisatawan dari tahun 2015 sebanyak 1.560.015 menjadi 1.768.578 di tahun 2016 atau meningkat sebesar 13,4%. Hal ini dapat menjadi prospek yang menjanjikan bagi peningkatan PAD Kabupaten Blitar jika pengelolaan pariwisata dilakukan secara baik.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bahwa Kabupaten Blitar dikelompokkan dalam pembangunan *cluster regional kelud* sebagai strategi untuk meningkatkan arah kegiatan pada perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata pantai dan perikanan. Guna menunjang penyelenggaraan kegiatan di sektor kepariwisataan pantai dan perikanan, melalui RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa terdapat tiga kawasan pesisir yang dikembangkan untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perikanan yaitu Pantai Jolosutro di Kecamatan Wates, Pantai Serang di Kecamatan Panggungrejo, dan Pantai Tambakrejo di Kecamatan Wonotirto. Ketiga kawasan tersebut dikelola dengan tujuan mampu untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi masuk kawasan wisata dan diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011.

Pantai Serang merupakan satu diantara beberapa destinasi wisata yang ditawarkan sebagai produk unggulan pariwisata di Kabupaten Blitar. Daya dukung kawasan Pantai Serang meliputi panorama alam dengan hamparan pasir sepanjang 2,835 km yang terbagi menjadi tiga kawasan pantai dan dipisahkan oleh perbukitan karang, pepohonan cemara undang disepanjang garis pantai, aksesibilitas yang mudah, kearifan lokal berupa tradisi Larung Sesaji setiap 1 Suro, serta satu-satunya tempat sebagai konservasi penyu di Kabupaten Blitar dan dikembangkan langsung oleh masyarakat. Pengembangan Pantai Serang direncanakan sebagai ikon pariwisata yang difokuskan pada wilayah Blitar Selatan. Hal ini bersamaan dengan dua destinasi wisata yang lain yaitu Candi Penataran dan Perkebunan Teh Sirah Kencong. Dalam menunjang percepatan pembangunan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Blitar mendukung peran

keterlibatan masyarakat setempat dalam usaha mengelola destinasi wisata yang terlampir pada rencana pengembangan *triangle diamond* pariwisata Kabupaten Blitar. Disebutkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan masyarakat sadar wisata, pembinaan kelompok sadar wisata (pokdarwis), pengembangan desa wisata, dan bimbingan teknis sapta pesona.

Sejak tahun 2014, pengembangan Pantai Serang sebagai destinasi wisata alam yang berbasis kawasan pesisir mulai mendapatkan perhatian di tingkat desa. Pengelolaan secara langsung dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan memperoleh dukungan dari Pemerintah Desa Serang. Pengelolaan kawasan Pantai Serang sebagai destinasi wisata merupakan unit usaha yang dikembangkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu memberikan sumbangan terhadap perolehan PADesa. Pelaksanaan pengelolaan Pantai Serang secara langsung digerakkan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) “Dewa Serang” sebagai organisasi di tingkat masyarakat yang khusus menangani usaha pariwisata desa khususnya Pantai Serang. Hal ini berdasarkan Perdes Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Serang Tahun 2014-2019).

Hermantoro dalam Nawawi (2013) menyatakan bahwa tidak ada kelompok lain yang mampu menjaga wisata bahari selain masyarakat (komunitas) lokal karena mereka paling tahu persoalan dan paling menerima dampaknya, baik positif maupun negatif. Sehingga upaya Pokdarwis Dewa Serang diwujudkan dengan mengintegrasikan potensi alam serta kearifan lokal yang meliputi budaya dan nilai-nilai yang berkembang. Pemberian pelayanan wisata yang telah diberikan oleh pokdarwis kepada wisatawan seperti penyediaan sarana dan prasarana penunjang wisata yang meliputi toilet, tempat sampah, area parkir, warung makan, serta *homestay*. Manajemen atraksi wisata yang dikembangkan yaitu dengan menyuguhkan wisata edukasi berupa konservasi penyu serta wahana permainan atau *outbond* seperti *flying fox* dan penyewaan *all terrain vehicle* (ATV). Event tahunan yang telah diselenggarakan yaitu berupa serangkaian acara yang dikemas dalam Serang Festival sejak tahun 2015.

Namun, kawasan Pantai Serang dalam pengelolaannya sebagai destinasi wisata alam mengindikasikan masih memiliki beberapa kendala permasalahan.

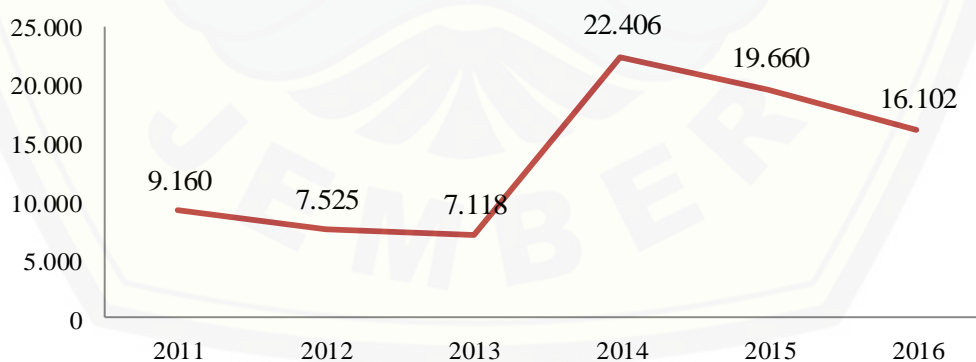
Indikasi tersebut terlihat dengan adanya daya dukung pengelolaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya tersedia dengan baik. Penataan lokasi terutama bagi ketersediaan warung-warung milik warga setempat belum terkonsep dan tertata dengan baik. Keberadaan warung berdasarkan hasil observasi awal justru terkesan mengurangi nilai eksotis dari panorama pemandangan alam kawasan pantai karena hampir memadati area pantai. Pembagian luas bangunan warung yang tidak merata terlihat kurang rapi serta mampu berpotensi menimbulkan konflik antar pemilik warung. Dampak lain yang juga ditimbulkan oleh banyaknya warung yaitu terjadi peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Penanganan yang tidak baik mampu menimbulkan citra bagi Pantai Serang sebagai kawasan wisata yang kumuh. Selain itu, kegiatan perawatan terhadap fasilitas penunjang wisata yang dilakukan oleh pengelola terkesan minim. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa fasilitas yang rusak seperti sekretariat pokdarwis sebagai pusat informasi, pendopo, jalan setapak berlubang, beberapa tempat sampah pecah, serta beberapa gazebo mulai rusak dan dipenuhi oleh coretan dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab.

Budaya gotong royong yang melekat sebagai citra masyarakat desa tidak selalu memberikan dampak yang positif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terkait tingkat kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian kurang menjadi prioritas utama. Pelaksanaan aktivitas pengawasan dan keamanan yang terlihat lengah ketika pada hari biasa. Kegiatan ini lebih fokus dan cenderung maksimal saat hari-hari tertentu seperti hari libur dan ketika berlangsungnya event. Aktivitas pengunjung yang luput dari perhatian akan berpotensi mengancam dan membahayakan keselamatan, mengingat sering terjadi kasus kecelakaan pengunjung yang hilang terseret ombak di Pantai Serang. Tentu saja hal ini akan membawa dampak yang kurang baik atas penilaian pengunjung terhadap sebuah destinasi wisata, karena tingkat keamanan sebagai salah satu indikator yang memengaruhi motif seseorang dalam berwisata.

Kemudian daya dukung masyarakat setempat juga belum sepenuhnya mengerti dan memahami konsep penerapan Sapta Pesona. Motif masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Serang lebih didominasi oleh

faktor keinginan untuk meningkatkan perekonomian. Motif ini ditandai dengan adanya aktivitas masyarakat setempat yang berupaya mencari keuntungan lebih pada usaha warung makan dan penyewaan toilet. Ketersediaan usaha-usaha lain seperti ketersediaan *homestay* serta kios-kios cinderamata terlihat masih minim. Kebiasaan-kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nampak kurang layak seperti cara berpakaian yang sebagian masyarakat enggan untuk mengenakannya. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang tergolong masih menengah ke bawah, karena rata-rata jenjang pendidikan yang ditempuh mayoritas warga setempat yaitu sebagai lulusan sekolah dasar.

Kelemahan dalam sistem manajemen pengembangan wisata Pantai Serang akan menjadi hal yang sangat berpengaruh (*affecters*) terhadap motif kunjungan wisatawan. Menurut Hanief (2018:91) hal-hal yang berpengaruh (*affecters*) merupakan faktor yang bisa membatalkan keinginan seseorang ketika ingin mengunjungi suatu daerah tujuan wisata yang telah direncanakan. Hal-hal yang berpengaruh tersebut dapat berupa informasi yang diperoleh berkaitan dengan objek wisata, apakah sesuai dengan harapan dan keinginan wisatawan. Terlihat dampak atas kelemahan dalam pengelolaan wisata Pantai Serang terhadap jumlah kunjungan wisatawan yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kunjungan wisatawan di Pantai Serang tahun 2011-2016

Sumber: data diolah Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan Pantai Serang di tahun 2014 sebagai awal pengembangan menjadi puncak dari kenaikan jumlah pengunjung dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun,

pada tahun berikutnya yaitu 2015 cenderung mengalami penurunan kembali. Padahal aktivitas wisata yang ditunjang oleh banyaknya wisatawan mampu mempengaruhi pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat setempat dari hasil pengeluaran yang dilakukan.

Menurut Inskeep dalam Prafitri (2016) menyatakan bahwa di dalam konteks kepariwisataan, kelembagaan dan pengorganisasian menjadi komponen terpenting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Dapat diasumsikan bahwa dalam aktivitas penyelenggaraan wisata di Pantai Serang diperlukan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Peran organisasi menjadi sentral ketika melaksanakan manajemen pengembangan sumber daya dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Menurut UNDP (2006), kapasitas dimaknai sebagai bentuk kemampuan dalam memecahkan masalah yang di tingkat individu, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Sehingga organisasi masyarakat yang dimaksud yaitu Pokdarwis dalam mengelola Pantai Serang menjadi ukuran tingkat kemampuan masyarakat sebagai pengelola, karena mereka sebagai kunci dalam menggerakkan penyelenggaraan kepariwisataan di Pantai Serang. Kapasitas organisasi dapat didasarkan atas kemampuan dalam pembentukan struktur organisasi (pengorganisasian), kepemimpinan, hubungan kemitraan yang dijalin, serta dilihat dari daya dukung organisasi tersebut. Kemudian hasil atas pengelolaan wisata dapat dilihat dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Berangkat dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kemampuan atau kapasitas organisasi masyarakat yaitu Pokdarwis Dewa Serang sebagai pengelola Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah, dicoba merumuskan masalah penelitian setajam atau sejelas mungkin. Sehingga tidak akan menimbulkan salah pengertian atau penafsiran terhadap masalah tersebut (Soeharto 1996:123). Rumusan masalah dapat berupa kalimat bertanya atau kalimat pertanyaan. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu “Bagaimana kapasitas organisasi

masyarakat Pokdarwis Dewa Serang dalam mengelola wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang kapasitas organisasi masyarakat Pokdarwis Dewa Serang dalam pengelolaan wisata Pantai Serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Soeharto (1996:129) umumnya kegunaan dan manfaat penelitian untuk memenuhi suatu maksud atau persyaratan “untuk apa” penelitian dan karya ilmiah itu. Sedangkan dalam kegunaan ini banyak diarahkan pada fungsinya. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **a. Teoritis**

Diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan juga sebagai referensi kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata.

#### **b. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bagi semua kalangan yang membutuhkan dan diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten Blitar memberikan perhatian terhadap pengembangan pariwisata bersama masyarakat.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori yang diperoleh dari pustaka guna mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dasar penelitian. Konsepsi dasar merupakan bagian terpenting penelitian. Karena dijadikan sebagai landasan teoritis dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa konsepsi dasar dijadikan sebagai pedoman penelitian. Konsep dasar dapat dirujuk atau dikutip dari berbagai sumber seperti teori-teori ahli, buku, maupun karya tulis ilmiah. Sumber pustaka yang dirujuk atau dikutip pada bagian ini harus dicantumkan dalam pernyataan yang mengacu dalam daftar pustaka. Penelitian ini dengan judul Kapasitas Organisasi Masyarakat Pokdarwis Dewa Serang Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar menggunakan konsep dasar sebagai berikut.

- a. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Pengelolaan kepariwisataan
- c. Pariwisata berbasis masyarakat
- d. Organisasi masyarakat
- e. Kapasitas organisasi

### **2.1 Kosep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam kajian ilmu administrasi negara. Menurut Siagian (2005) dalam Damayanti (2014) memaknai administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah yang mempunyai fokus analisis khusus yang merupakan fokus analisis disiplin lain, yaitu penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara. Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Secara umum tujuan dari adanya administrasi pembangunan yaitu pembangunan bangsa

(Tjokroamidjojo, 1995:13).

Selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup administrasi pembangunan, Tjokroamidjojo (1995:15) membagi ruang lingkup administrasi pembangunan menjadi tiga poin sebagai berikut.

1. Penyempurnaan administrasi negara (*The Development of Administration*) yang meliputi:
  - a. kepemimpinan, koordinasi, pengawasan;
  - b. administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain, dan kelembagaan dalam arti sempit.
2. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (*The Administration of Development*)
3. Partisipasi masyarakat, melakukan perubahan-perubahan ke arah (*change*) modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial-ekonomi.

Kartasasmita (1997) dalam Ngusmanto (2015:2) menegaskan bahwa pembangunan administrasi dapat dijelaskan dari pendekatan organisasi, sedangkan administrasi dalam pembangunan dapat dijelaskan dengan pendekatan manajemen. Pencapaian tujuan-tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik dalam orientasi menuju modernitas, pembangunan bangsa, serta pembangunan sosial ekonomi tidak secara keseluruhan mampu dilaksanakan hanya oleh peran pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi lain yang penting dalam pendekatan administrasi pembangunan yaitu tentang upaya membangun partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat berdasarkan mekanisme kerja dalam proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan dari pemerintah. Partisipasi sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan (Dewi, 2013).

Menurut Tjokroamidjojo (1995:222) terdapat empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu sebagai berikut.

- a. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan



pembangunan yang dilakukan pemerintah.

- b. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Brandon (1993) dalam Damanik dan Weber (2006:106) mengungkapkan ada beberapa langkah dasar dalam penyusunan rencana proyek yaitu sebagai berikut.

- a. Pemahaman tentang peran masyarakat.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek dengan mengajak pimpinan lokal, asosiasi lokal, gagasan-gagasan dan harapan masyarakat setempat menjadi sentral dalam penyusunan rencana proyek.
- c. Membentuk kelompok pemangku kepentingan lokal yang akan terlibat intensif dalam proyek.
- d. Memadukan manfaat keuntungan dengan kegiatan konservasi secara langsung.
- e. Memastikan bahwa keuntungan itu dinikmati oleh masyarakat setempat, baik secara perorangan maupun kolektif.
- f. Memastikan bahwa pemimpin informal dan formal masyarakat, dengan memperhatikan aspek jender, terlibat dalam perencanaan.
- g. Menciptakan perubahan, mengajak organisasi-organisasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas ekonomi.
- h. Memahami bahwa setiap kawasan memiliki situasi yang khusus.
- i. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berlanjut.

Pada pelaksanaan atau implementasi proyek-proyek pembangunan di sektor kepariwisataan haruslah mampu untuk dijangkau oleh kemampuan yang ada di kalangan masyarakat sekitar destinasi. Dengan kata lain, proyek-proyek tersebut harus mampu melibatkan partisipasi aktif dari golongan miskin baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tingkat pengawasan. Sehingga mereka dapat memiliki landasan yang kuat dalam proses *self-management*. Inti dari tujuan

pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepariwisataan sebetulnya adalah terciptanya kemandirian lokal khususnya masyarakat setempat disekitar destinasi. Sementara dalam pelaksanaan pengembangan kemandirian lokal, diperlukan upaya pemberdayaan sumber daya manusia terhadap pendayagunaan potensi lingkungan kepariwisataan setempat menjadi sangat penting.

Sunaryo (2013:156) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek dasar kemandirian lokal dalam perspektif kemandirian pembangunan kepariwisataan, diantaranya sebagai berikut.

- a. *Community oriented*, yaitu pembangunan kepariwisataan yang didasarkan pada kebutuhan nyata dan didasari oleh masyarakat setempat.
- b. *Community based*, yaitu pembangunan kepariwisataan tadi harus berdasarkan pada sumber daya dari masyarakat setempat, yaitu SDM, SDA, sumber daya kelembagaan ekonomi-sosial-politik dan nilai-nilai yang mendukungnya.
- c. *Community managed*, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mengikutsertakan masyarakat setempat dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan pemanfaatan hasil kegiatan kepariwisataan yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan atas peran dan partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam konsep penyelenggaraan pembangunan yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di dalamnya. Dalam pengembangan dan pembangunan di sektor pariwisata masyarakat dipandang sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan secara langsung. Dikarenakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Pengelolaan Kepariwisataaan**

### **2.2.1 Pariwisata**

Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta dan terdiri dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. *Pari* berarti seluruh, semua dan penuh. *Wisata* berarti perjalanan. Dengan demikian, pariwisata dapat

diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari sesuatu tempat, menuju dan singgah di suatu atau di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula (Kodhyat, 1996:9). Menurut Karyono (1997:15) definisi pariwisata dapat dibagi menjadi dua yaitu definisi yang bersifat umum dan yang lebih teknis.

a. Definisi bersifat umum

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan.

b. Definisi secara teknis

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Selanjutnya organisasi pariwisata dunia *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut (Suryadana dan Octavia, 2015:30).

Pariwisata bukanlah sektor yang mampu berdiri sendiri, namun berkaitan dengan sektor-sektor lain. Dampak adanya penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan seluruh komponen dalam pariwisata namun juga memberikan dampak terhadap komponen lain di luar pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata merupakan fenomena yang sangat kompleks. Menurut Kodhyat (1996:10) kompleksitas tersebut disebabkan antara lain sebagai berikut.

- a. Pariwisata merupakan suatu media atau instrumen bagi terjadinya berbagai interaksi (baik interaksi antara manusia dengan manusia, antara kelompok manusia dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda, maupun antara manusia dengan lingkungannya).
- b. Pariwisata menyentuh segala aspek kehidupan manusia ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan alam sehingga bersifat lintas sektoral.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam melihat pariwisata dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan oleh seseorang atau sekelompok orang menuju tempat di luar tempat asalnya dan bersifat sementara. Bertujuan untuk mencari kesenangan dan atau tidak untuk mencari pekerjaan. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata dapat disebut sebagai wisatawan.

### 2.2.2 Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata sejatinya merupakan penyebutan lain dari objek wisata. Sesuai peraturan pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 kata objek wisata sudah tidak relevan lagi untuk menyebut suatu daerah tujuan wisata sehingga digunakanlah kata “daya tarik wisata”. Menurut Nyoman S. Pendit (1994) dalam Suryadana dan Octavia (2015:51) bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Daya tarik wisata merupakan bagian terpenting dari sebuah produk wisata wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Sunaryo (2013:25) membagi daya tarik wisata ke dalam tiga jenis sebagai berikut.

1. Daya tarik wisata alam, merupakan daya tarik yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugrah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam, seperti; pantai, laut, danau, gunung, hutan, sungai, dan air terjun.
2. Daya tarik wisata budaya, adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya (*situs/heritage*) maupun yang nilai budaya yang masih hidup (*the living culture*) dalam kehidupan di suatu masyarakat, yang dapat berupa: upacara/ritual, adat-istiadat, seni-pertunjukan, seni-kriya, seni-sastra maupun seni-rupa maupun keunikan kehidupan sehari-hari yang dipunyai oleh suatu masyarakat.
3. Daya tarik wisata minat khusus, merupakan daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti: pengamatan satwa tertentu (*birds*

*watching*), memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*), arum jeram, golf (*sport*), wisata agro dll.

Suatu daya tarik wisata dapat menarik minat kunjungan wisatawan harus mampu memenuhi beberapa persyaratan. Maryani dalam Suryadana dan Octavia (2015:53) bahwa setiap daya tarik wisata harus memenuhi beberapa syarat berikut.

a. *What to see*

Di tempat tersebut harus memiliki objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain. Dapat dikatakan bahwa daerah tersebut harus mampu menawarkan daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan sebagai “entertainment” bagi wisatawan.

b. *What to do*

Selain banyak yang bisa dilihat dan disaksikan, suatu daerah wisata harus dapat menyediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah lama untuk tinggal.

c. *What to buy*

Tempat tujuan wisata harus mampu menyediakan fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal.

d. *What to arrived*

Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana wisatawan dapat mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ke tempat tujuan wisata tersebut.

e. *What to stay*

Berkaitan dengan bagaimana wisatawan dapat tinggal untuk sementara waktu selama dia berlibur. Diperlukan pembangunan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.

### 2.2.3 Konsep Pengelolaan Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan mengacu pada bagaimana pengelolaan destinasi wisata dilakukan dalam rangka menarik minat wisatawan. Pengelolaan

merupakan istilah yang seringkali dipakai di dalam ilmu manajemen. Menurut Richard L. Daft dalam Kadarman (2001:10) manajemen/pengelolaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan fungsi-fungsi merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan (disebut juga fungsi-fungsi manajemen). Kemudian Leiper dalam Pitana dan Diarta (2009:80) menyatakan bahwa pengelolaan (manajemen) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Pengelolaan merupakan bentuk tindakan yang penting terhadap pembangunan suatu obyek wisata. Tahap-tahap di dalam pengelolaan pariwisata merujuk pada fungsi manajemen yang secara umum terdiri dari kegiatan sebagai berikut.

a. Perencanaan

Menurut George R. Terry dalam Sukarna (1990:27) perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan/asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dalam pembangunan pariwisata memiliki fungsi dalam menyediakan sebuah kerangka yang memungkinkan suatu destinasi untuk mampu peka terhadap setiap perubahan dan mengatasi permasalahan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sebagai wujud upaya pengaplikasian tugas dan tanggungjawab sesuai rencana awal. Menurut Syafiie (1999:79) pelaksanaan merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah, berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar. Diperlukan koordinasi yang baik sebagai kunci keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan dalam mengelola potensi wisata.

c. Pengawasan

Syafiie (1999:82) merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan diperlukan agar dalam setiap proses yang berlangsung sesuai dengan perencanaan awal yang perlu dipatuhi. Tahapan pengawasan mampu memberikan *steering* kepada pelaku/pengelola untuk menciptakan keefektifan dalam pengelolaan obyek wisata.

d. Penilaian/Evaluasi

Penilaian atau evaluasi merupakan penentuan secara periodik terkait efektivitas kinerja yang dicapai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Upaya penilaian sebagai motivasi bagi pengelola dalam mencapai sasaran. Hasil dari evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menekan segala bentuk perilaku yang tidak semestinya serta untuk merangsang tindakan dengan memberikan umpan balik berupa penghargaan (*reward*).

Prajudi (1990) menyatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu (Adisasmita, 2011:21). Pengelolaan terhadap potensi-potensi wisata ditujukan dalam upaya menciptakan Sapta Pesona. Penciptaan Sapta Pesona diperlukan kesadaran dari berbagai pihak mulai dari unsur pemerintah, dunias usaha (swasta), dan masyarakat. Berikut ketujuh unsur dari Sapta Pesona yang dicanangkan sebagai program pemerintah sejak 18 Januari 1988 dalam Keputusan Menteri (Waluyo, dkk., 1995:37).

- a. *Aman*, sebagai suatu bentuk kondisi atau keadaan yang memberikan suasana tenang dan rasa tentram bagi wisatawan.
- b. *Tertib*, adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib dan teratur secara disiplin dalam semua kehidupan masyarakat.
- c. *Bersih*, suatu kondisi atau keadaan yang menampilkan sifat bersih dan sehat (hygienis).
- d. *Sejuk*, menggambarkan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang memberikan suasana segar dan nyaman.
- e. *Indah*, keadaan yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi

sehingga memancarkan keindahan.

- f. *Ramah tamah*, merupakan sifat dan perilaku masyarakat yang akrab dalam pergaulan hormat dan sopan dalam berkomunikasi, suka senyum, suka menyapa, suka memberikan pelayanan dan ringan kaki untuk membantu tanpa pamrih, baik yang diberikan oleh petugas/aparat unsur pemerintah maupun usaha pariwisata yang secara langsung melayani.
- g. *Kenangan*, bentuk kenyamanan yang baik dari segi lingkungan, pelayanan kamar, pelayanan makan minum maupun pelayanan-pelayanan lainnya.

Inskeep (1991) dalam Suryadana dan Octavia (2015:33-34) menyatakan bahwa di berbagai macam literatur dimuat berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen dasar pariwisata perlu menjadi bahan pertimbangan dalam tahap perencanaan pembangunan wisata. Dikarenakan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen kompensasi menurut Inskeep tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata
- b. Akomodasi
- c. Fasilitas dan pelayanan wisata
- d. Fasilitas dan pelayanan transportasi
- e. Infrastruktur lain
- f. Elemen kelembagaan

Pengembangan kepariwisataan harus mampu memberi perhatian pada aspek-aspek lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan obyek wisata. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata menekankan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan yang mengacu pada nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial. Menurut Cox dalam Pitana dan Diarta (2009:81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi (melestarikan), proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang



menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.

- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan dan pengembangan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Diperlukan suatu metode dalam pengelolaan wisata dengan tujuan untuk menyinergikan pengelolaan dengan prinsip-prinsipnya. Metode pengelolaan pariwisata harus mampu menggerakkan semua aspek yang terlibat dan berkontribusi dalam penyelenggaraan proses pembangunan pariwisata. WTO dalam Pitana dan Diarta (2009:88) memaparkan metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengkonsultasian dengan semua pemangku kepentingan.
- b. Pengidentifikasian isu yang mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata.
- c. Penyusunan kebijakan.
- d. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus.
- e. Penyediaan fasilitas dan operasi.
- f. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif.
- g. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat

#### 2.2.4 Keberhasilan Pengelolaan Pariwisata

Penyelenggaraan sistem pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara efektif sesuai perencanaan akan memiliki kemungkinan untuk menghasilkan capaian sebagai berikut:

- a. pertumbuhan ekonomi dan keuangan efektif nyata bagi masyarakat lokal;
- b. perbaikan kualitas hidup, pola hidup dan peluang budaya dari produk lokal;
- c. pengembangan ekonomi dengan daur ulang dan penggunaan pendapatan pariwisata;

- d. keuntungan potensial karena kepentingan dan aktivitas ikutan dari penduduk yang pernah berkunjung sebagai wisatawan; dan
- e. pemeliharaan dan peningkatan kualitas dari sumber daya lingkungan (Hadinoto, 1996:58).

### 2.3 Pariwisata Berbasis Masyarakat

#### 2.3.1 Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat

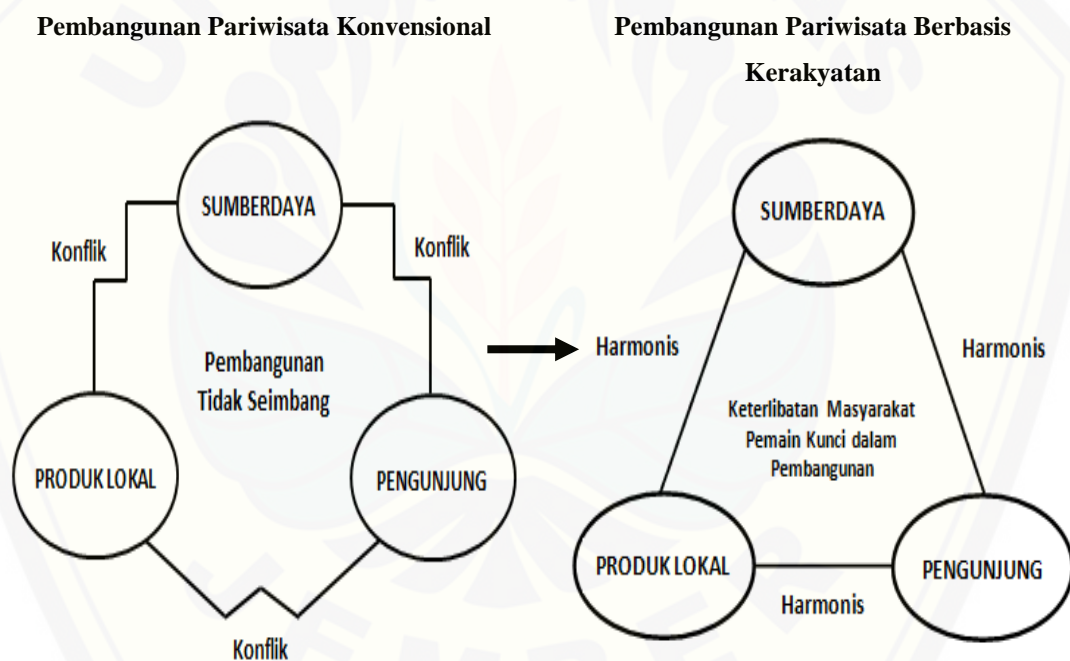
Keberhasilan sebuah pembangunan kepariwisataan tidak dapat terlepas dari peran aktif dari masyarakat setempat sebagai aktor. *Community Based Resources Management* merupakan Korten (1986) dan Pitana (1999) dalam Sukarno (2017) terdapat tiga alasan mengapa hal ini sangat penting dalam pembangunan sumber daya wisata berbasis kerakyatan yang sebagai berikut.

- a. Sumber daya lokal (*local resources*), secara tradisional sumber daya atau potensi lokal telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat setempat yang sudah dipandang mampu mengelola lingkungannya sendiri karena telah mewarisi kearifan itu secara turun temurun dari generasi ke generasi dengan baik.
- b. Terbentuknya tanggungjawab lokal (*local accountability*), artinya bahwa pengelolaan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggungjawab karena kegiatan yang dilaksanakan tersebut secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.
- c. Variasi antardaerah (*local variety*), dimana daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki kekhususan tersendiri sehingga perlu adanya pengelolaan yang berbeda pula.

Sedangkan menurut Fandeli (1995) mendefinisikan pengelolaan wisata sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan tempat atau obyek wisata dengan cara mengatur, membina, dan memelihara obyek serta mengatur dan mengawasi pengunjung dengan organisasi pengelola yang ada. Menurut Prasiasa (2011:95) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan sebuah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang sangat berbeda dengan pendekatan konvensional yang selama ini dijalankan, yaitu dengan sistem *top-down* dan sentralistik. Sistem pengelolaan *top-down* ini bersifat membatasi ide-ide

yang ada di dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk wisata. Sunaryo (2013:138) menyatakan bahwa kontruksi CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang sering mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Selanjutnya, Natori (2001) dalam Prasiasa (2011:98) telah membedakan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan. Berikut konsep perbedaan pariwisata konvensional dan berbasis masyarakat.



Gambar 2.1 Perbedaan pariwisata konvensional dan berbasis kerakyatan

Sumber: Natori dalam Prasiasa (2011:99)

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat sebagai pendekatan yang berfokus pada proses penyelenggaraan pariwisata yang berasal dari sistem *bottom-up*. Penekanan pada pendekatan ini pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan manajemen penyelenggaraan pariwisata baik proses

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan. Implikasi yang ingin diwujudkan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu tulisan Murphy (1988) dalam Sunaryo (2013:139) telah memberikan beberapa batasan pengertian tentang CBT dengan kisi-kisi sebagai berikut:

1. wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada;
2. wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada;
3. bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Menurut Adimihardja dalam Sunaryo (2013:215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Lebih lanjut Sunaryo (2013:219) mengenalkan konsep terkait upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan yang hakikatnya diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut.

- a. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
- b. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/ partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT) merupakan terobosan penyelenggaraan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan upaya *bottom-up*. Masyarakat khususnya masyarakat setempat bertindak sebagai aktor atau pelaku dalam manajemen penyelenggaraan kepariwisataan. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal yang lebih memahami akan potensi wisata yang dimiliki.

### 2.3.2 Prinsip-prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat

Beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri dalam Nurhayati (2007) dalam gagasannya sebagai berikut.

- a. Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata.
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek.
- c. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.
- d. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas.
- e. Berperan Mengembangkan kebanggaan komunitas.
- f. Mengembangkan kualitas hidup komunitas.
- g. Menjamin keberlanjutan lingkungan.
- h. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal.
- i. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas.
- j. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

## 2.4 Organisasi Masyarakat

Secara teoritik, Kadarman, dkk. (2001:82) mengungkapkan bahwa pengorganisasian (*organizing*) merupakan sebuah proses penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau institusi lain dan bagian-bagiannya, pengelompokkan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk

melaksanakannya, serta pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik secara horisontal maupun vertikal dalam struktur organisasi. Lebih lanjut Kadarman, dkk. (2001:84) menyatakan bahwa struktur organisasi sebagai cara dimana kegiatan-kegiatan suatu organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasikan. Penetapan struktur organisasi bertujuan untuk memperjelas lingkungan kerja untuk setiap orang supaya mengetahui siapa yang harus melaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab atas hasil kerja yang dicapai.

Kemudian Sunaryo (2013:197) mendefinisikan organisasi atau institusi adalah suatu bentuk kesatuan unsur 'formal' (kesepakatan) beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, yang secara berkesinambungan mempengaruhi sistem pengelolaan sumber daya, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa yang disebut sebagai organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dari sektor pariwisata yang dimaksud organisasi masyarakat merupakan masyarakat yang mengorganisir dan bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut (penjelasan pasal 5 huruf e UU No. 10 Tahun 2009). Selanjutnya dalam penelitian ini, organisasi masyarakat yang bergerak pada sektor pengelolaan kepariwisataan ditekankan pada kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Rahim (2012:16) menyatakan bahwa kelompok sadar wisata atau yang disebut Pokdarwis merupakan organisasi di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelompok sadar wisata

didirikan dalam rangka untuk menciptakan sebuah iklim yang kondusif bagi berkembangnya pelaksanaan kepariwisataan di tingkat desa berdasarkan konsep Sapta Pesona. Pengembangan kelompok masyarakat semacam ini dimaksudkan sebagai bentuk motivator, penggerak serta komunikator bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata sebagai tuan rumah yang baik yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kemudian menurut penjelasan dalam *www.berdesa.com* bahwa Pokdarwis bergerak dalam bidang pelayanan jasa pariwisata secara swadaya, yang dapat diartikan sebagai langkah pengembangan kepariwisataan yang dijalankan berdasarkan kemampuan daripada pendayagunaan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki. Kemudian Pokdarwis harus mampu mengembangkan dirinya sendiri secara swakarsa yang artinya bahwa pengembangan yang dilakukan berdasar potensi kreativitas yang mereka miliki sendiri, karena mereka yang bertanggungjawab dan berkuasa atas pengembangan dan pendayagunaan desa dengan segala sumber daya yang mereka miliki. (sumber: <http://www.berdesa.com/bangun-wisata-desa-pokdarwis-terbukti/>.)

Kemudian Rahim (2012:16) mengemukakan bahwa Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya sebagai berikut.

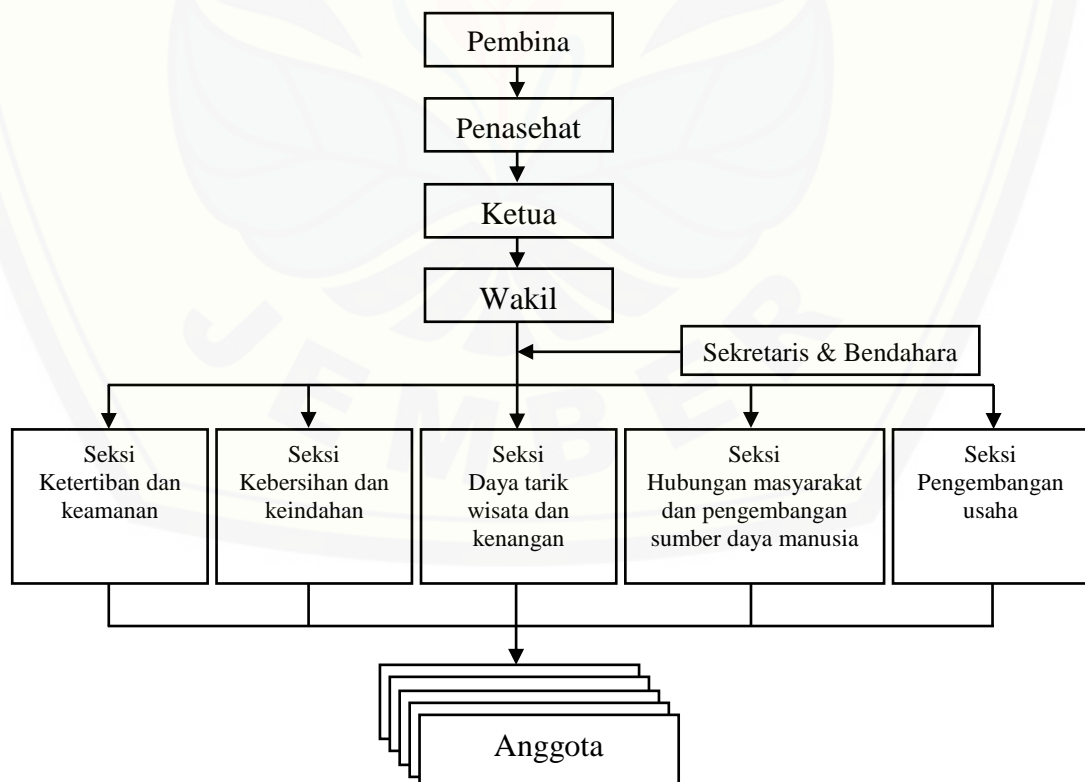
- a. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
- c. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis
- d. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan

Rahim (2012:18) juga menyebutkan bahwa fungsi secara umum yang dimiliki oleh Pokdarwis dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata. *Kedua*, sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki kedudukan di desa/kelurahan di sekitar destinasi pariwisata.

Lebih lanjut Rahim (2012: 19) menjadi bagian dari keanggotaan Pokdarwis secara umum memiliki beberapa syarat umum, yaitu sebagai berikut.

- a. Bersifat sukarela
- b. Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan
- c. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata
- d. Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung
- e. Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang

Hubungan dalam kepengurusan Pokdarwis terjalin secara intensif dan terkoordinasi dalam suatu struktur organisasi yang sistematis. Sehingga setiap pihak atau bagian mengetahui tentang jabaran tugas dan wewenang masing-masing dengan baik. Struktur organisasi pokdarwis dapat digambarkan sebagai berikut (Rahim, 2012:23).



Gambar 2.2 Struktur organisasi pokdarwis



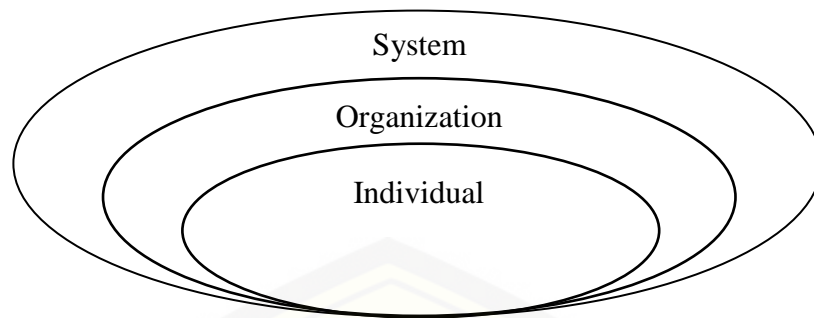
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa organisasi masyarakat di sektor kepariwisataan merupakan bentuk keterpaduan dalam sebuah kerangka organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesukarelaan dan keinginan untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan demi memperoleh manfaatnya. Pokdarwis sebagai struktur organisasi kemasyarakatan yang bertanggungjawab secara sadar untuk mengelola dan mendayagunakan potensi-potensi di daerahnya serta mewujudkan Sapta Pesona.

## **2.5 Kapasitas Organisasi**

### **2.5.1 Kapasitas**

Kapasitas dalam berbagai literatur sering diartikan sebagai kemampuan atau ketrampilan dalam melakukan sesuatu hal dalam mencapai target. Namun, sekarang ini kapasitas dalam pengertian yang lebih luas digunakan sebagai arti dalam pembangunan masyarakat. Secara umum menurut Fukuda Parr & al. (2002) dalam Willems dan Baumert (2003:5), kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur serta mencapai tujuan. Kapucu, Healy, dan Arslan dalam Prafiti (2016) menyatakan bahwa kapasitas merupakan suatu sumber daya, tingkat kepemimpinan, kemampuan atau keahlian masyarakat yang memadai, tingkatan tertentu pada pelembagaan. Kapasitas dapat diartikan pula sebagai kemampuan seseorang, organisasi atau sosial untuk melaksanakan tujuan pengembangan atas dasar keberlanjutan (*sustainable*). Dalam prakteknya, kapasitas harus dikaitkan dan memiliki kesesuaian dengan tugas-tugas pokok yang telah ditetapkan dari pekerjaan tim organisasi atau sistem. Namun yang terpenting bahwa kapasitas memiliki keterkaitan terhadap penyelenggaraan manajemen strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Goodman, et.al dalam Noho (2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga level kapasitas. Ketiga level tersebut yaitu level individu, organisasi/kelambagaan, dan level masyarakat/sistem.



Gambar 2.3 Level kapasitas

Seringkali makna kelembagaan dan organisasi oleh beberapa pihak disamakan. Namun di antara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. North (1990) dalam Djogo, Sunaryo, dan Sirait (2003:4) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi atau lembaga dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. Sehingga North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya. Menurut Purwaka (2010:15) kapasitas kelembagaan atau *institutional capacity* adalah kemampuan suatu organisasi kelembagaan untuk berdasarkan hukum (aturan) yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan dalam wujud satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan peran dan peranannya, serta tugas pokok dan kompetensinya. Sehingga dapat dimaknai bahwa kelembagaan memberikan aturan main bagi organisasi untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa kapasitas sebagai kemampuan atau keahlian dalam memecahkan permasalahan serta sebagai upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan sebagai bentuk tingkat kapasitas yang mengintegrasikan nilai-nilai kebiasaan sebagai aturan main yang mengikat dalam pola hubungan antar individu serta organisasi. Kajian dalam penelitian ini menitikberatkan kepada peran masyarakat sebagai organisasi atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan Pantai Serang. Sehingga tingkat kapasitas yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kapasitas tingkat organisasi.

### 2.5.2 Kapasitas Organisasi

Milen (2004:21) menjelaskan bahwa pendekatan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memberikan fokus pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi, strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas.

Kapasitas organisasi menurut Chaskin (2001:154) mencakup tentang sumber daya yang memadai, manajemen yang kompeten, kemampuan untuk mengenali peluang serta terlibat dalam interaksi strategis dengan lingkungan organisasi, serta penting untuk mengembangkan hubungan antarorganisasi dari waktu ke waktu untuk institusinya. Titik fokus dalam kapasitas organisasi yaitu pada upaya strategi membangun kepemimpinan, modal sosial, dan kolaborasi antarorganisasi.

#### a. Model kepemimpinan

Kadarman, dkk. (2001:143) mendefinisikan tentang kepemimpinan yaitu sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menjadi fasilitator bagi anggotanya untuk mencapai tujuannya. Kemudian menurut Koontz, O'Donnell dan Weihrich dalam Kadarman (2001:144) bahwa cara tentang bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaannya akan mempengaruhi terhadap model atau gaya kepemimpinan yang diterapkan. Oleh karenanya, terdapat tiga gaya kepemimpinan.

1. *Otokratik*, pemimpin dipandang sebagai orang yang memberi perintah dan dapat menuntut. Keputusan ada di tangan pemimpin.
2. *Demokratik atau Partisipatif*, pemimpin dipandang sebagai orang yang tidak akan melakukan suatu kegiatan tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu pada bawahannya. Pemimpin disini mengikutsertakan pendapat bawahan sebelum ia membuat keputusan.

3. *Free Rein*, pemimpin hanya menggunakan sedikit kekuasaan dan memberi banyak kebebasan kepada bawahan untuk melakukan kegiatan. Pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator melalui pemberian informasi dan sebagai orang yang berhubungan dengan kelompok lain.

b. Modal sosial

Riadi (2018) menyatakan bahwa modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. (sumber: <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-komponen-fungsi-dan-jenis-modal-sosial.html>). Modal sosial sebagai bentuk kewajiban yang diinstitusionalisasikan seperti peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan, dan keterikatan yang pada akhirnya menghasilkan tindakan bersama. Timbulnya modal sosial ini bersala dari interaksi yang terjadi antara orang-orang dalam sebuah komunitas tertentu. Terdapat tiga komponen utama dalam modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*norms*), serta jaringan (*network*).

c. Kolaborasi antarorganisasi

Kolaborasi antarorganisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama diantara dua atau lebih organisasi yang memiliki kesepakatan dan berlandaskan motif tertentu. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran (sumber: <http://sinergantara.or.id/platform-sinergi/kolaborasi/>).

UNDP (2010:6) mengenalkan tentang kerangka melihat kapasitas dalam organisasi berdasarkan pendekatan berbasis pada hasil. Semua institusi atau organisasi baik formal dan informal, di sektor publik, masyarakat sipil dan sektor swasta, memiliki tujuan untuk melakukan fungsi dan menghasilkan produk atau layanan yang mungkin untuk dikembangkan. Dengan demikian, mereka

menggunakan sumber daya yang ada (aset manusia, keuangan dan fisik) serta kompetensi untuk mengkonversi masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian hasil (*outcome*) seperti peningkatan pemberian layanan; yang kemudian berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Tiga level mengukur kapasitas dalam organisasi

|                           | <b>Impact (Dampak)</b>  | <b>Outcome (Hasil)</b>   | <b>Output (Keluaran)</b>   |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Definisi</b>           | Perubahan aktual atau yang dimaksudkan dalam pengembangan manusia yang diukur dengan kesejahteraan orang-orang; itu umumnya menangkap perubahan dalam kehidupan orang-orang | Perubahan aktual atau yang dimaksudkan dalam kondisi pengembangan yang dicari oleh intervensi mendukung. Biasanya berkaitan dengan perubahan dalam kemampuan institusi untuk bekerja lebih baik dan memenuhi mandatnya | Hasil pengembangan jangka pendek yang dihasilkan oleh kegiatan proyek dan non-proyek; itu umumnya sebuah produk dan atau layanan yang memungkinkan tercapainya hasil |
| <b>Indikator/komponen</b> | Perubahan kesejahteraan orang-orang   | a. Perubahan kinerja kelembagaan<br>b. Stabilitas<br>c. Kemampuan beradaptasi  | a. Pengaturan organisasi<br>b. Kepemimpinan<br>c. Pengetahuan<br>d. Akuntabilitas  |

Sumber: UNDP (2010:28)

### 1. Dampak (*impact*)

Indikator atau komponen yang dapat dilihat yaitu melalui kesejahteraan orang-orang. Sebuah dampak umumnya menangkap perubahan dalam kehidupan manusia. Ini merepresentasikan tujuan yang mendasarinya seperti kondisi kehidupan yang lebih baik, melalui peningkatan kesehatan, pendapatan, pendidikan, gizi, atau lingkungan.

### 2. Hasil (*outcome*)

Sebuah kerangka dalam melihat kebermanfaatan dari keluaran sebuah organisasi yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Kinerja organisasi merupakan kombinasi dari keefektifan dan efisiensi dimana suatu institusi atau organisasi memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan lembaga tercapai. Efisiensi adalah

perbandingan dari apa yang dihasilkan atau apa yang telah dicapai dengan sumber daya yang digunakan seperti uang, waktu, tenaga kerja, dll.

- b. Stabilitas adalah sejauh mana suatu organisasi dapat menurunkan volatilitas kinerja melalui pelembagaan dan pengorganisasian praktik-praktik dan norma-norma yang baik untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko internal dan eksternal melalui manajemen risiko. Langkah-langkah stabilitas memberikan gambaran yang bergerak tentang seberapa baik kinerja suatu organisasi maupun lembaga dari waktu ke waktu.
- c. Adaptabilitas adalah kemampuan untuk melakukan kerja di masa depan dan memenuhi kebutuhan masa depannya. Lembaga berada di bawah ancaman konstan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, dan kinerja kelembagaan yang kuat saat ini tidak selalu memastikan kinerja tinggi di masa depan. Mengubah kebutuhan dan tantangan membutuhkan institusi berinvestasi untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk dapat mengantisipasi, beradaptasi, dan menanggapi sesuatu yang selalu berubah lingkungan hidup.

### 3. Keluaran (*output*)

Output adalah hasil pengembangan jangka pendek yang dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Pengaturan instisusi dan organisasi, pengaturan struktual di tingkat kelembagaan mengacu tentang kebijakan dan kerangka hukum. Kemudian di tingkat organisasi, melihat dari strategi organisasi, proses, dan teknologi yang memungkinkan untuk dioperasikan. Mekanisme akuntabilitas internal juga termasuk dalam masalah inti ini. Lebih lanjut juga dapat diketahui dari ekrutmen atau restrukturisasi, manajemen sumber daya manusia, mekanisme koordinasi, dan kemitraan yang dijalin.
- b. Kepemimpinan, berkenaan dengan kemampuan untuk memengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang, organisasi, dan institusi untuk tujuan yang dicapai. Ini adalah katalis untuk mencapai, meningkatkan dan mempertahankan tujuan pembangunan.

- c. Pengetahuan, atau secara harfiah diartikan sebagai apa yang diketahui orang, dan sebagai daya dukung kapasitas daripada individu. Secara tradisional, pengetahuan telah dipupuk pada tingkat individu, sebagian besar melalui pendidikan. Tetapi itu bisa juga dibuat dan dibagikan dalam suatu organisasi, misalnya melalui pelatihan kejuruan untuk mengembangkan sistem manajemen.
- d. Akuntabilitas, dapat diwujudkan ketika pemegang hak mampu membuat pengembalian tugas memenuhi kewajibannya. Akuntabilitas dalam suatu organisasi ditangkap oleh inti masalah dalam pengaturan kelembagaan.

Kemudian Baser dan Morgan (2008:26) mengkonstruksikan lima elemen kapasitas inti yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan fungsinya dan mampu bertahan pada lingkungan yang lebih kompleks. Berikut gambaran skematik dari lima elemen inti kapasitas.



Gambar 2.4 Elemen kapasitas inti

Sumber: Baser dan Morgan (2008:26)

- a. Kemampuan untuk berkomitmen dan terlibat

Pentingnya rasa memiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam organisasi akan membawa dampak baik bagi keberlanjutan institusinya.

Sehingga dibutuhkan kesadaran untuk menumbuhkan komitmen dalam diri untuk turut terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Kemampuan ini terkait kemauan, tujuan pemberdayaan, motivasi tinggi, sikap, dan kepercayaan diri.

b. Kemampuan inti untuk melaksanakan teknis, penyampaian layanan dan tugas logistik

Pada dasarnya organisasi diupayakan sebagai pemberi layanan baik bagi lingkup internal maupun eksternal, melaksanakan fungsinya, merumuskan beberapa kebijakan, dan mengatur kegiatan. Kemampuan ini sering kali terkait upaya dalam melaksanakan aktivitas tersebut, organisasi dituntut untuk melaksanakan tugas secara teknis atau logistik seperti analisis program, manajemen keuangan, manajemen pengembangan proyek, advokasi, dan lain sebagainya. Sehingga organisasi memerlukan daya dukung secara teknis.

c. Kemampuan menjalin relasi untuk menarik sumber daya dan dukungan

Kemampuan ini berkaitan dengan upaya menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar organisasinya. Organisasi diharuskan mampu mengolah, mengelola, dan mempertahankan hubungan kerjasama yang diperlukan. Sehingga diperlukan upaya untuk menarik dukungan untuk memperoleh kesepakatan menjalin relasi dengan menghasilkan sumber daya pendanaan, staff, maupun pembelajaran. Kemampuan ini seringkali berhubungan dengan perolehan kredibilitas, legitimasi serta mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

d. Kemampuan beradaptasi dan memperbarui diri

Seiring dengan perkembangan global, akan terus berlangsung perubahan-perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi. Perubahan yang semakin cepat menuntut organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan. Perbaikan diri menjadi upaya menyesuaikan pada perubahan dan perkembangan untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Kemampuan ini biasanya terkait dengan reposisi atau pengaturan kembali organisasi, serta melakukan inovasi perubahan.



e. Kemampuan menyeimbangkan koherensi dan perbedaan

Tantangan yang harus dihadapi organisasi akan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya organisasi tersebut. Untuk itu, organisasi memerlukan kemampuan dalam menumbuhkan minat yang mencakup keberagaman dari keseluruhan bidang dan identitas diri. Namun, secara bersamaan organisasi harus mampu mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan kepentingan anggota organisasi. Sehingga diperlukan kemampuan untuk menyeimbangkan atau mencari koherensi atas perbedaan.

Mengacu dari beberapa pendapat para ahli tentang kapasitas organisasi tersebut, dalam menggambarkan kapasitas organisasi masyarakat yaitu Pokdarwis Dewa Serang dalam mengelola kawasan Pantai Serang, maka digunakan empat komponen kapasitas organisasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2 Komponen penelitian

| No. | Komponen  | Tinjauan   |
|-----|---|--|
| 1.  | Struktural organisasi   | Ditinjau dari kemampuan bagaimana pendirian organisasi, pemenuhan posisi dan pembagian kerja setiap individu, serta proses pengambilan keputusan dalam mengelola Pantai Serang.  |
| 2.  | Kemampuan pelaksanaan kepemimpinan                            | Ditinjau dari bagaimana gaya atau model kepemimpinan yang diterapkan, kemampuan pemimpin untuk mengkoordinir kinerja anggota, serta interpersonal pemimpin.  |
| 3.  | Kemampuan menjalin hubungan kerjasama (kemitraan) dan promosi | Ditinjau dari bagaimana kemampuan organisasi dalam kemitraan yang pernah dilakukan dalam upaya mengelola wisata Pantai Serang, serta bagaimana upaya mempromosikan Pantai Serang kepada pihak luar.  |
| 4.  | Kemampuan sumber daya pendukung organisasi                    | Ditinjau berdasarkan kemampuan sumber daya manusia (pengetahuan dan komitmen), sumber daya finansial (model pendanaan), penyediaan infrastruktur (fasilitas pendukung dan penggunaan teknologi), manajemen strategi organisasi (daya tarik wisata), dan daya dukung masyarakat setempat. |
| 5.  | Dampak pengelolaan terhadap masyarakat setempat               | Ditinjau dari hasil pengelolaan wisata Pantai Serang yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.  |

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu

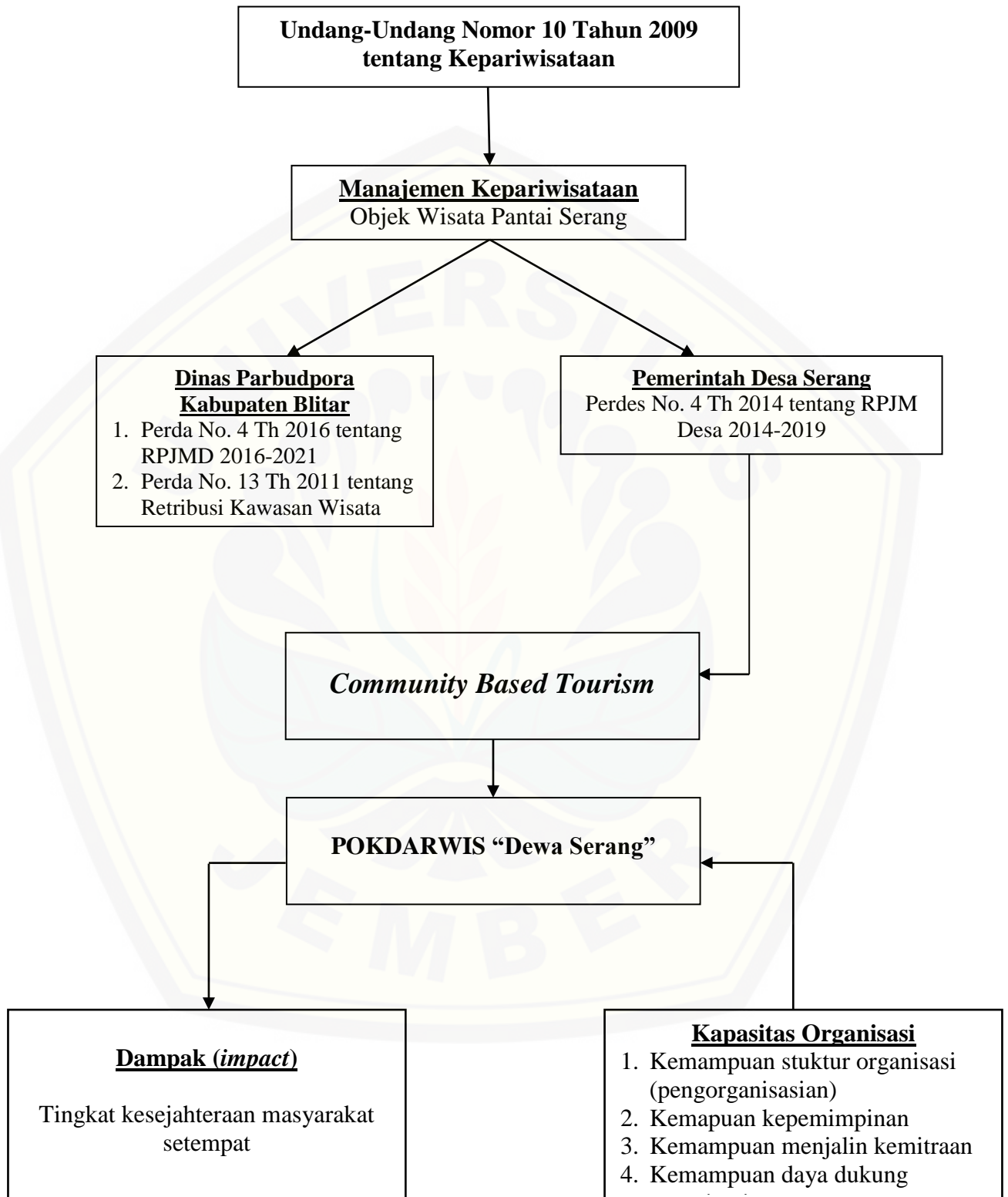
|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>a. Judul</b>            | Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)   | Kapasitas Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Endogen (Studi Tentang Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Temas dalam Mengembangkan Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu)  |
| <b>b. Penulis</b>          | Gita Prafitri dan Maya Damayanti   | Robertha Astri Karunia Dewi Rizkwati  |
| <b>c. Tahun Penelitian</b> | 2016   | 2017  |
| <b>d. Lembaga</b>          | Universitas Diponegoro, Semarang   | Universitas Airlangga, Surabaya   |
| <b>e. Hasil Penelitian</b> | <p>Pelaksanaan Desa Wisata Ketenger memiliki kapasitas baik di tingkat organisasi maupun tingkat individu. Kapasitas organisasi yang dilihat dari kepemimpinan dan koordinasi menunjukkan bahwa kapasitas organisasi POKDARWIS “Ketenger <i>Adventure</i>” kurang baik karena tergantung terhadap pemimpin organisasi dan adanya permasalahan pada aspek koordinasi. Pada aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan atraksi wisata serta aspek promosi desa wisata, organisasi pengelola Desa Wisata Ketenger telah menunjukkan kapasitas yang baik. Pada tingkat individu, Desa Wisata Ketenger telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata, pengelolaan atraksi wisata, cinderamata dan konveksi, serta pelayanan wisatawan. Namun individu belum menunjukkan kapasitas yang baik dalam memahami dan mengaplikasikan konsep</p> | <p>Kapasitas BKM Temas dalam mengembangkan kampung wisata tani jika dilihat dari empat komponen dapat disimpulkan bahwa hanya satu komponen yang menunjukkan kategori menengah yaitu kemampuan kepemimpinan. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan dalam membangun hubungan dan kepercayaan dan interpersonal yang baik. Kemudian untuk tiga komponen lainnya yaitu struktur organisasi, kemampuan membangun hubungan dan promosi, serta kemampuan sumber daya pendukung organisasi dikatakan masih menunjukkan kapasitas organisasi yang rendah.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | desa wisata.  |   |
| <b>f. Metode dan Pendekatan Penelitian</b> | Kualitatif-deskriptif   | Kualitatif-deskriptif                       |
| <b>g. Perbedaan</b>                        | a. Tempat penelitian<br>b. Waktu penelitian<br>c. Komponen penelitian | a. Tempat penelitian<br>b. Waktu penelitian |

Sumber: diolah dari Damayanti (2014), dan Prafitri (2016)



## 2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.5 Kerangka berpikir

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan serangkaian cara sistematis dan berurutan yang digunakan oleh peneliti untuk mencari fakta-fakta yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian.

Secara umum metode penelitian sebagai bentuk kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk mencari jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian bergantung dari keberhasilan metode yang dipilih dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu metode dalam penelitian memerlukan teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan dan mengumpulkan informasi yang ada. Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan penelitian
- b. Tempat dan waktu penelitian
- c. Situasi sosial
- d. Desain penelitian
- e. Teknik dan alat pengumpulan data
- f. Teknik menguji keabsahan data
- g. Teknik penyajian dan analisis data

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang tertulis dalam latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (1993:30) menyatakan bahwa metodologi kualitatif menunjuka kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data

kualitatif: ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan ini, mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik (utuh). Jadi, pokok kajiannya baik organisasi atau individu tidak akan direduksi (disederhanakan) kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesa yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang hasil dari temuannya tidak diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Berdasarkan definisi tentang penelitian kualitatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan wisata Pantai Serang yang berbasis masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat atau lokasi penelitian merupakan komponen yang dianggap penting karena berkaitan dengan target dalam studi lapangan untuk melakukan pengamatan maupun observasi. Tempat penelitian sebagai lokasi utama untuk menghimpun berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan waktu sebagai fokus kapan berlangsungnya penelitian yang dilakukan dari rentang awal hingga akhir penelitian. Penelitian bermula atas dasar adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dan pada waktu tertentu pula yang perlu untuk diteliti.

Penelitian ini dilakukan di lokasi utama yaitu di objek wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo. Selain itu, guna menunjang kelengkapan data dan informasi dalam menjawab pertanyaan tentang permasalahan maka penelitian juga dilakukan di beberapa tempat yaitu Kantor

Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar dan beberapa tempat lain. Sedangkan waktu yang diperlukan dalam penelitian ini kurang lebih dua bulan lamanya.

### 3.3 Situasi Sosial

#### a. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada objek wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Kemudian tempat berikutnya untuk menghimpun data dan informasi yaitu di Kantor Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar.

#### b. Pelaku (*Actor*)

Istilah subjek dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif disebut sebagai informan sebagai sumber perolehan data dan informasi yang dibutuhkan. Pelaku yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar
2. Kasi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar
3. Kepala Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
4. Ketua Pokdarwis “Dewa Serang”
5. Ketua Pokja Pantai Serang
6. Anggota Pokja Pantai Serang
7. Masyarakat pemilik usaha
8. Pengunjung

Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pengelolaan Pantai Serang seperti pembagian kerja oleh pengelola, pelayanan jasa wisata terhadap pengunjung, dan penyediaan fasilitas penunjang wisata di Pantai Serang.

### 3.4 Desain Penelitian

Terdapat dua desain dalam penelitian terkait paradigma ilmiah atau alamiah. Menurut Moleong (2004:20) bagi paradigma ilmiah, desain harus disusun secara

pasti sebelum fakta dikumpulkan. Sekali desain digunakan, maka tidak boleh mengubahnya dalam bentuk apa pun. Sebab, jika diadakan perubahan, maka perubahan itu akan mengaburkan variabel sehingga penafsiran yang bermakna menjadi tidak mungkin dilakukan. Sedangkan bagi paradigma alamiah, desain dapat disusun sebeumnya secara tidak lengkap. Apabila sudah mulai digunakan, maka desain itu mulai dilengkapi dan disempurnakan. Desain itu dapat senantiasa diubah dan disesuaikan dengan apa yang diperoleh dan disesuaikan pula dengan pengetahuan baru yang ditemukan. Sedangkan menurut Nazir (2003:85) desain penelitian tidak pernah dilihat sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi dilihat dari segi baik atau tidak baik saja. Karena desain juga mencakup rencana studi, maka di dalamnya selalu ada *trade off* antara kontrol atau tanpa kontrol, antara objektivitas dan subjektivitas. Desain tergantung dari derajat akurasi yang diinginkan, level pembuktian dari tingkat perkembangan dari bidang ilmu yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan salah satu cirinya yaitu bersifat diskriptif. Tujuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan deskripsi dan gambaran atas data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Menurut Moleong (2004:6) pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan jauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya “mengapa”, “alasan apa”, dan “bagaimana terjadinya” akan senantiasa dimanfaatkan peneliti.

#### 3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti agar tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jalannya sebuah penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti perlu menentukan batas-batas dalam bidang temuan atau sumber perolehan data dengan arahan dari fokus penelitian, sehingga peneliti akan lebih terarah dan lebih fokus dalam proses pencarian data mana yang perlu dan patut dimasukkan kedalam sejumlah data



yang sedang dikumpulkan. Menurut Idrus (2009:42) dalam fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Pengelolaan wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.
- b. Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

#### 3.4.2 Data dan Sumber Data

Data yang valid merupakan sumber bahan yang penting dalam penelitian. Tanpa adanya data, bobot informasi dalam penulisan laporan penelitian memiliki kekurangan. Hal ini karena data yang valid berfungsi sebagai fakta dan sumber informasi bagi objek dan bahasan penelitian yang akan disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu digunakan untuk menjawab perihal masalah penelitian. Menurut Mulyadi (2007:301) data merupakan komponen fisik yang kedua dari bagian berwujud teknologi informasi.

Data dibedakan dari informasi karena data merupakan bahan baku dalam pembuatan informasi. Data merupakan kumpulan fakta yang sudah dipisahkan. Sedangkan informasi adalah data yang memberikan tambahan nilai bagi seseorang atau kelompok orang. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

#### 3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan istilah sebagai pemberi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dan kebutuhan penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait penentuan informan penelitian tersebut, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria dan berkompeten dalam bidangnya yang sesuai terkait dengan penelitian ini. Beberapa informan tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar
- b. Kasi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar
- c. Kepala Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
- d. Ketua Pokdarwis “Dewa Serang”
- e. Ketua Pokja Pantai Serang
- f. Sekretaris Pokja Pantai Serang
- g. Anggota Pokja Pantai Serang
- h. Pemilik Warung Makan
- i. Pemilik Parkir
- j. Pemilik *Homestay*
- k. Pengunjung

### 3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan bagaimana proses peneliti dalam mengumpulkan dan siapa yang akan diteliti. Dalam proses pengeumpulan data perlu memikirkan tentang populasi dan sampel penelitian atau subjek penelitian, kode etik yang perlu ditempuh, serta perlu mengikuti prosedur-prosedur tertentu untuk memastikan kejujuran dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan selanjutnya, peneliti perlu untuk menentukan jenis-jenis informasi yang dikumpulkan. Kemudian pada tindakan terakhir, peneliti perlu menentukan instrumen/alat penelitian yang akan dipakai untuk mengumpulkan data penelitian. Alat pengeumpulan data dalam penelitian ini menggunakan smartphone sebagai alat perekam dan dokumentasi gambar, buku catatan dan bolpoin, serta pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

#### a. Observasi

Sebuah observasi atau pengamatan dapat berperan dalam memberikan catatan informasi bagi peneliti untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Dalam observasi ini diperlukannya beberapa alat bantu observasi seperti daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

- a. partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. eksperimental atau lawannya noneksperimental.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi dan sistematis, artinya teknik observasi yang observer tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-

faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dari kinerja kelembagaan dan mengelola Pantai Serang baik oleh Dinas Parbudpora dan Pokdarwis “Dewa Serang”.

#### b. Wawancara

Moleong (2001:135) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Dalam proses wawancara memerlukan beberapa alat penunjang guna membantu untuk mencatat dan merekam penjelasan dari responden atau informan apabila daya ingat dari peneliti kurang baik.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk menggali informasi tentang kemampuan atau kapasitas kelembagaan dalam memajukan pengelolaan wisata yang dilakukan di Pantai Serang. Kemudian ditambah untuk mencari informasi tentang kelebihan atau kelemahan yang terkait pengelolaan objek wisata Pantai Serang. Narasumber dalam penelitian ini dipilih sesuai kemampuan di bidangnya dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan wawancara ini berupa draf/pedoman wawancara, buku catatan dan bolpoin, alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

#### c. Dokumentasi

Usman dan Akbar (2009:69) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi merupakan salah bentuk perolehan data secara sekunder. Manfaat teknik dokumentasi menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji,

menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Penelitian ini memerlukan dokumen yang relevan dengan masalah-masalah penelitian untuk mendukung perolehan data-data dari teknik pengumpulan data lainnya. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya dan mendorong; berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu terkait Rencana Strategis Dinas Parbudpora Tahun 2016-2021, dan data kunjungan wisata. Kemudian dokumen yang dibutuhkan lain seperti foto kegiatan atau agenda-agenda terkait pengelolaan di Pantai Serang dan foto terkait proses wawancara.

### **3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data**

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Tahap ini berkaitan dengan tahap akhir dalam menguji tentang kevaliditasan data apakah data yang diperoleh menunjukkan fakta-fakta yang benar terjadi. Menurut Moleong (2001:173) untuk menentukan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Terdapat empat kriteria yang dapat digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data agar dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan

| Kriteria                                  | Teknik Pemeriksaan  |
|---|---|
| <b>Kredibilitas (derajat kepercayaan)</b> | (1) Perpanjangan keikut-sertaan<br>(2) Ketekunan pengamatan<br>(3) Triangulasi<br>(4) Pengecekan sejawat<br>(5) Kecukupan referensial<br>(6) Kajian kasus negatif<br>(7) Pengecekan anggota |
| <b>Kepastian</b>                          | (8) Uraian rinci  |
| <b>Kebergantungan</b>                     | (9) Audit kebergantungan  |
| <b>Kepastian</b>                          | (10) Audit kepastian  |

Sumber: Moleong (2001:175)

Berdasarkan teknik-teknik yang dipaparkan pada tabel di atas. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dirasa tepat untuk diterapkan yaitu sebagai berikut.

a. Ketekunan Pengamatan

Peneliti merupakan instrumen dalam penelitian jika menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan menganalisis data. Sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Menurut Moleong (2001:177) bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan waktu tidak terjadwal dan spontanitas.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode atau teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data yang diperoleh tersebut. Denzin (1978) dalam Moleong (2001:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dapat diartikan sebagai upaya pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut yang ditujukan untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.

Trianggulasi memiliki tiga model, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mencocokkan perolehan data atau informasi dari narasumber satu dengan yang lainnya. Kemudian juga mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh melalui observasi atau hasil dokumentasi.

### 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

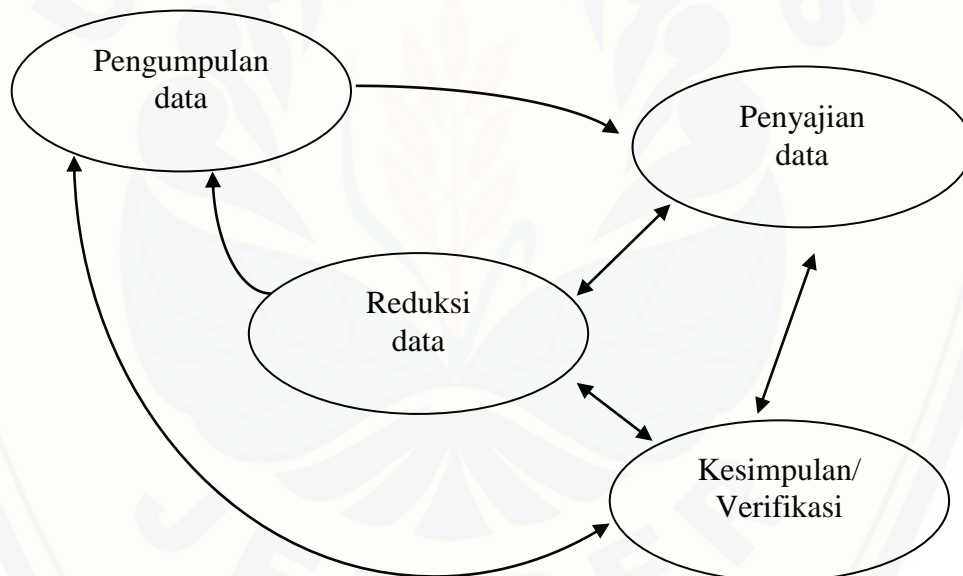
Setelah memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, tahap berikutnya yaitu terkait upaya untuk menyajikan data. Menurut Usman dan Akbar (2009:85) penyajian data (*data display*) merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan analisis data menurut Moleong (2001:103) merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Banyaknya data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:85) yang membagi proses analisis data menjadi tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data ini dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema,

membuat gugus-gugus, menulis memo dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

- b. Penyajian Data, merupakan bentuk pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbebenntuk matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tindakan atau kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data yang diperoleh harus diuji kebenarannya, kecocokannya, dan kekokohnya.



Gambar 3.1 Model interkatif Miles dan Huberman (1994)

Sumber: Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:88)



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

- a. Struktur organisasi masyarakat yang dibentuk sebagai pengelola wisata Pantai Serang yaitu Pokdarwis Dewa Serang dan Pokja Pantai Serang. Pembentukan pokdarwis melalui musyawarah desa, kemudian Pokdarwis Dewa Serang membentuk Pokja Pantai Serang sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan Pantai Serang. Keanggotaan Pokdarwis berjumlah  $\pm$  200 orang. Jumlah ini terlihat tidak efektif karena sebagian dari anggota kurang berperan aktif. Koordinasi antara pokdarwis dengan pokja dilaksanakan melalui pertemuan rutin setiap bulan dengan agenda musyawarah dan evaluasi terkait pengelolaan destinasi wisata Pantai Serang.
- b. Kemampuan kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Yudi Krisdiantoro mengacu pada gaya kepemimpinan demokratis. Pendapat setiap anggota dan masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap tahap perencanaan pengelolaan wisata di Pantai Serang. Keputusan diperoleh dari hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah. Sehingga semua keputusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan dukungan dan aspirasi semua pihak. Secara personal Bapak Yudi memiliki kualitas yang baik.
- c. Kemampuan menjalin hubungan kemitraan dengan pihak eksternal menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Kemitraan pokdarwis dijalin baik dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Kemitraan oleh Pokdarwis Dewa Serang difokuskan pada tiga sasaran yaitu upaya peningkatan kapasitas sumber daya organisasi, upaya mencari dukungan pendanaan, dan kerjasama sebagai bentuk promosi. Pihak pokdarwis maupun masyarakat tidak ingin ada keterlibatan peran dari investor dalam pengembangan Pantai Serang.
- d. Kemampuan dari sumber daya dukung Pokdarwis Dewa Serang ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut.

- Sumber daya manusia yang menunjukkan komitmen yang baik, namun pengetahuan dan kemampuan dalam memahami potensi serta melaksanakan pengelolaan wisata masih memiliki keterbatasan.
  - Sumber daya finansial pokdarwis sebagai anggaran kegiatan operasional dan pemenuhan fasilitas penunjang. Pendanaan diperoleh dari hasil swadaya berupa iuran dan sumbangan dari anggota dan warga setempat, penyertaan modal dan pinjaman dari BUMDesa, hasil penataan mobil, serta penjualan tiket saat event seperti Serang Festival.
  - Kemampuan penyediaan infrastruktur fisik yaitu seperti toilet, parkir, tempat sampah, mushola, gazebo, dan warung dari hasil swakarsa dan inisiatif bersama. Beberapa fasilitas diperoleh dari beberapa instansi. Sedangkan kemampuan mengelola Facebook sebagai media informasi publik masih kurang efektif.
  - Strategi organisasi yang menjadi sasaran pokdarwis terbagi menjadi dua sasaran yaitu upaya optimalisasi daya tarik wisata dan sarana pendukung serta optimalisasi sumber daya manusia. Kemampuan yang baik ditunjukkan dalam penyelenggaraan Serang Festival yang terus mengalami perkembangan sebagai atraksi unggulan.
  - Partisipasi masyarakat menunjukkan keterlibatan yang tinggi dengan semangat gotong-royong terutama dalam kemampuan menjaga kebersihan dan keamanan kawasan pantai.
- e. Perkembangan pengelolaan Pantai Serang membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Usaha-usaha baru dari masyarakat semakin meningkat terutama warung makan. Usaha lain berupa Pertumbuhan usaha baru serta penyelenggaraan event tertentu mampu meningkatkan penghasilan hingga 100% yang kemudian berimplikasi pada kesejahteraan warga setempat.

## 5.2 Saran

- a. Pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan peran dari pokdarwis dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Pantai Serang, karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur di tingkat pemerintah daerah. Pengaturan melalui

penetapan regulasi menjadi point penting sebagai legalitas dan landasan untuk mengembangkan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola. Selain itu juga sebagai wujud bentuk perhatian pemerintah dalam melayani dan melindungi masyarakat.

- b. Diperlukan upaya koordinasi yang baik diantara pengelola di tingkat destinasi yaitu masyarakat dengan pemerintah daerah untuk memutuskan sebuah hubungan kerjasama dalam pengembangan wisata. Masukan dari masyarakat setempat menjadi faktor penting dikarenakan masyarakat setempat sebagai penerima dampak langsung dari adanya aktivitas wisata.
- c. Perlu adanya perbaikan atas sistem rekrutmen anggota, salah satu caranya dengan menekankan pada aspek kemampuan atau keahlian serta pengalaman, sehingga tidak hanya atas dasar komitmen saja. Seiring penyelesaian proses kerjasama perlu disiapkan kematangan konsep dalam penataan usaha masyarakat agar tidak menimbulkan konflik. Kemampuan dalam penguasaan teknologi menjadi pekerjaan rumah bagi pokdarwis sebagai media promosi Pantai Serang.
- d. Keterlibatan masyarakat harus terus difasilitasi dengan berbagai kegiatan serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Antisipasi terhadap dampak interaksi dengan pengunjung perlu diperhatikan mengingat pentingnya mempertahankan kultur dan kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu daya tarik wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baser, H. dan Morgan, P. 2008. *Capacity, Change and Performance: Study Report ECDPM*. Discussion Paper No 59B
- Bogdan, R. & Tayot, S. J. 1993. *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chaskin, R. J. 2001. *Building Community Capacity*. New York: Aldine De Gruyter
- Damanik, J. dan H. F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Djogo, T., Sunaryo, S. D. & Sirait, M. 2003. *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri Bahan Ajaran Agroforestri 8*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Potensi Obyek Wisata Alam. Dalam Fandeli (Ed). Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit UI.
- Hanief, Shofwan dan Praman, Dian. 2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- IMF, Hakura & Nsouli. 2003. *The Millennium Development Goals, The Emerging Frameworks For Capacity Building, and Teh Role Of The IMF*.
- Kadarman, A.M dkk. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: PT Grasindo.
- Katz, M. Saul. 1985. *Modernisasi administrasi Untuk Pembangunan Nasional: Suatu Arahan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Kodhyat. 1996. *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Korten, D. (1990). *Getting to the 21st Century: Voluntary action and the global agenda*. Connecticut: Kumarian Press.

- Milen, Anneli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Moleong, L. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murdiatuti, A. dkk. 2014. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Nucholis, Hanif. 2007. *Teori Dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pitana, I Gede & I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Prasiasa, D.P. Oka. 2011. *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Purwaka, Tommy H. 2010. *Model Analisis Pengembangan Kapasitas*. Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Siagian, Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soeharto, Bohar. 1996. *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi-Thesis*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 1990. *Prinsip-Prinsip Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Suryadana M.L. dan Vanny, Octavia. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Usman, H. dan Purnomo S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi ke 3. Jakarta: PT Bumi Aksara.

UNDP. 2010. *Capacity Development: Measuring Capacity*. New York

Waluwo, Harry dkk. 1995. *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### Jurnal Ilmiah

Dewi, M. H. U. 2013. *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Jurnal Kawistara, 3(2).

<https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/viewFile/3976/3251>.

[diakses pada 17 Desember 2017]

Noho, Y. (2014). *Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata Religius Bongo Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Nasional Pariwisata, 6(1), 8-21.

[https://journal.ugm.ac.id/tourism\\_pariwisata/article/view/6872](https://journal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6872) [diakses pada

17 Desember 2017]

Prafitri, G. R. Dan Damayanti, M. 2016. *Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ketenger, Banyumas)*.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/download/591/pdf>.

[diakses pada 14 Maret 2018].

Rikzwanti, Robertha A. K. D. 2017. *Kapasitas organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Endogen, Studi Tentang Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Temas Dalam Mengembangkan Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu*.

<http://repository.unair.ac.id/69946/>. [diakses tanggal 23 Mei 2018].

Sukarno, T. H. 2017. *Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Kasus: Dampak Pembangunan Pariwisata Di Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan)*.

<http://ojs.stpbali.ac.id/index.php/jpar/article/view/206/183>. [diakses tanggal 23 Juli 2018]

**Internet**

<https://blitarkab.bps.go.id/> [diakses tanggal 18 Maret 2018]

<https://www.blitarkab.go.id> [diakses tanggal 23 Maret 2018]

Berdesa. Bangun Wisata Desa Dengan Pokdarwis, Terbukti!. <http://www.berdesa.com/bangun-wisata-desa-pokdarwis-terbukti/>. [diakses tanggal 27 Juni 2018]

Riadi, Muchlisin. 2018. Pengertian Komponen Fungsi dan Jenis Modal Sosial. <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-komponen-fungsi-dan-jenis-modal-sosial.html>. [diakses tanggal 02 April 2018].

Sinergantara. 2013. Kolaborasi. <http://sinergantara.or.id/platform-sinergi/kolaborasi/>. [diakses tanggal 02 April 2018].

**Peraturan**

Konsep Pembangunan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Dokumen Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar).

Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.

Perda Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Peraturan Desa Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Tahun 2014-2019.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2018.

Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.



**LAMPIRAN**



**Lampiran 1** Pedoman wawancara Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar

1. Apa keunggulan Pantai Serang dibanding objek wisata lain?
2. Kapan Pantai Serang mulai menjadi destinasi unggulan Kabupaten Blitar?
3. Siapa yang bertindak sebagai pengelola kawasan Pantai Serang?
4. Adakah keterlibatan masyarakat?
5. Adakah regulasi khusus yang mengatur tentang organisasi masyarakat sebagai pengelola wisata?
6. Bagaimana peran Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar dalam pengelolaan Pantai Serang?
7. Bagaimana bentuk pendampingan kepada masyarakat yang terlibat dalam kepariwisataan di Pantai Serang?

**Lampiran 2** Pedoman wawancara Pemerintah Desa Serang

1. Apa keunggulan Pantai Serang dibanding objek wisata lain?
2. Kapan Pantai Serang dipertimbangkan sebagai objek wisata desa?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan wisata Pantai Serang?
4. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan tersebut? Apakah masyarakat terlibat?
5. Apakah ada struktur organisasi di tingkat masyarakat sebagai pengelola?
6. Bagaimana kapasitas/kemampuan yang ditunjukkan oleh pengelola?
7. Apa peran pemerintah desa?
8. Bagaimana bentuk pendampingan dari Pemerintah Desa Serang kepada pengelola dan masyarakat setempat?
9. Adakah kelebihan dan kelemahan dalam pengelolaan Pantai Serang oleh masyarakat?
10. Bagaimana dampak pengelolaan kawasan Pantai Serang terhadap masyarakat?

**Lampiran 3** Pedoman wawancara Pengelola Kawasan Pantai Serang

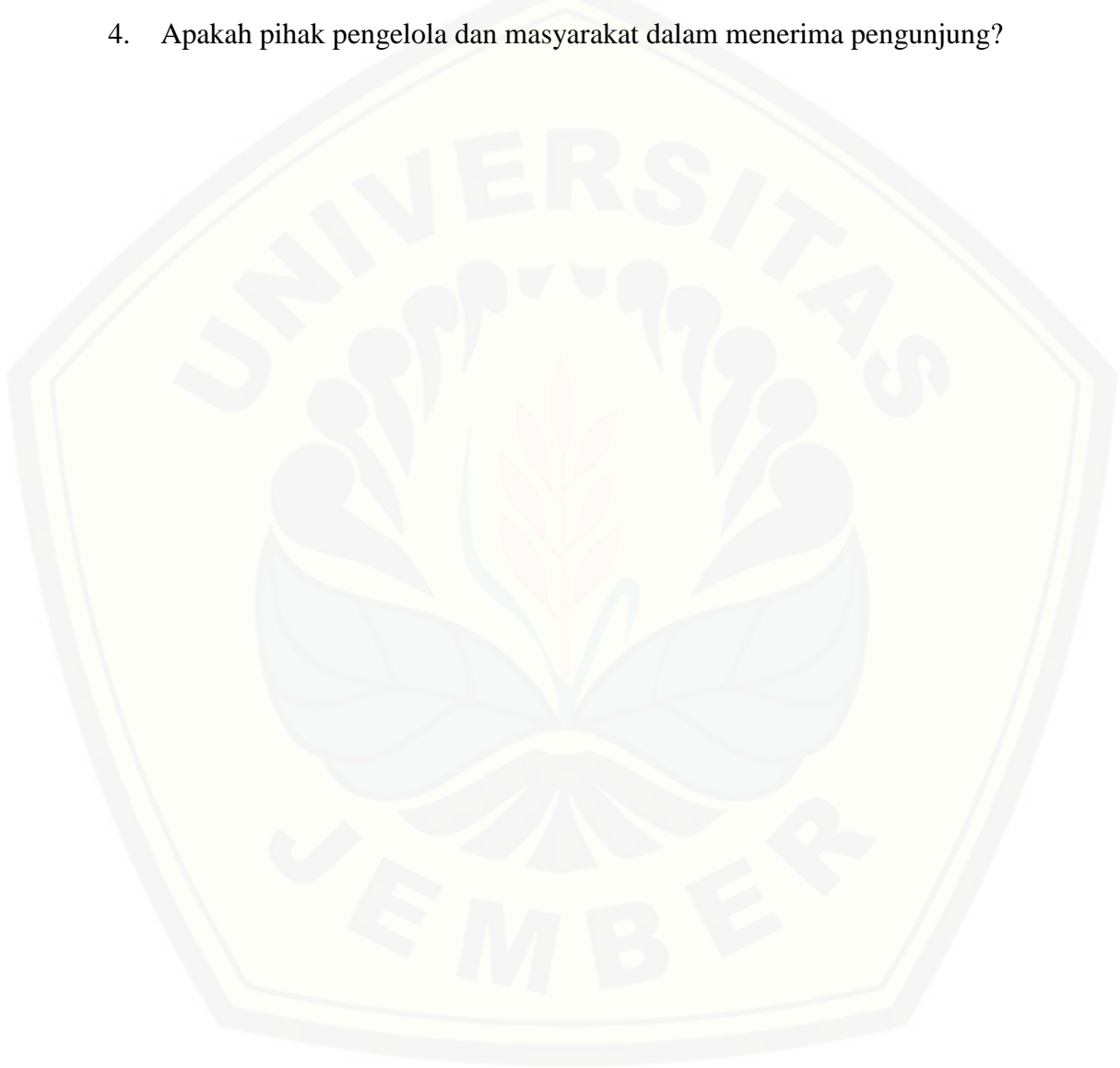
1. Apa keunggulan Pantai Serang dibanding objek wisata lain?
2. Kapan Pantai Serang dipertimbangkan sebagai objek wisata desa?
3. Siapakah yang menjadi inisiator awal untuk mengembangkan Pantai Serang?
4. Kapan pembentukan organisasi kepariwisataan di tingkat masyarakat?
5. Bagaimana mekanismenya? Dan siapa yang terlibat?
6. Bagaimana wujud pengelolaan yang dilakukan? (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi)
7. Bagaimana model kepemimpinan dan koordinasi yang diterapkan?
8. Bagaimana perolehan pemasukan anggaran sebagai kegiatan operasional?
9. Apa yang menjadi daya dukung organisasi pengelola Pantai Serang?
10. Bagaimana manajemen promosi/pemasaran Pantai Serang oleh pengelola?
11. Bagaimana kemitraan yang disediakan?
12. Bagaimana peran partisipasi dari masyarakat setempat?
13. Adakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dair pengloalan Pantai Serang?
14. Adakah kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan Pantai Serang?
15. Apa harapan ke depan oleh pengelola?

**Lampiran 4** Pedoman wawancara Masyarakat Setempat

1. Apa keunggulan Pantai Serang dibandingkan objek wisata lain?
2. Apakah masyarakat mendukung penyelenggaraan kepariwisataan Pantai Serang?
3. Bagaimana upaya pengelola mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pantai Serang?
4. Bagaimana wujud kontribusi nyata masyarakat dalam pengelolaan Pantai Serang?
5. Bagaimana pengaruh pengembangan Pantai Serang terhadap kehidupan masyarakat?

**Lampiran 5** Pedoman wawancara Pengunjung Pantai Serang

1. Apa keunggulan Pantai Serang dibandingkan objek wisata lain?
2. Menurut anda bagaimana pengelolaan wisata di Pantai Serang?
3. Bagaimana sarana dan prasarana di Pantai Serang?
4. Apakah pihak pengelola dan masyarakat dalam menerima pengunjung?



**Lampiran 6** Dokumen Perdes Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJM Desa tahun 2014-2019

**BAB III**  
**POTENSI DAN MASALAH**

**3.1. POTENSI**

Desa Serang memiliki potensi yang beraneka ragam , kekayaan yang dimiliki baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kelembagaan / organisasi yang hingga saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal untuk diberdayakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa memakmurkan desa.

**3.1.1. Sumber Daya Alam**

Potensi sumberdaya alam yang ada di Desa Serang antara lain :

a. Tanaman Pangan:

- Luas Lahan menurut komoditas pada tahun ini :

| Jenis Tanaman  | Luas Tanam | Hasil           |
|----------------|------------|-----------------|
| Jagung         | 135 Ha     | 1.350<br>Ton/Ha |
| Kacang Kedelai | 10 Ha      | 20 Ton/Ha       |
| Padi           | 70 Ha      | 490<br>Ton/Ha   |
| Cabe           | 23 Ha      | 69 Ton/Ha       |
| Ketela         | 42 Ha      | 420 Ton/Ha      |

- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

|  |             |
|--|-------------|
| Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian | 569 Orang   |
| Tidak memiliki                               | 182 Orang   |
| Memiliki kurang 0,5 Ha                       | 123 Orang   |
| Memiliki 0,5 – 1,0 Ha                        | 72 Orang    |
| Memiliki lebih dari 1,0 Ha                   | 84 Orang    |
| Jumlah total rumah tangga petani             | 1.030 Orang |

- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

|         |       |             |
|---------|-------|-------------|
| Alpukat | 5 Ha  | 0.5 Ton/Ha  |
| Pisang  | 10 Ha | 0.25 Ton/Ha |
| Mangga  | 5 Ha  | 0.25 Ton/Ha |
| Sirsak  | 3 Ha  | 0.30 Ton/Ha |

- Jenis komoditas perkebunan rakyat yang dibudidayakan

|        |       |             |
|--------|-------|-------------|
| Coklat | 2 Ha  | 0.25 Ton/Ha |
| Tebu   | 50 Ha | 25 Ton/Ha   |

#### b. Peternakan

- Jenis Populasi Ternak

| Jenis Ternak | Jumlah Ternak | Jumlah Pemilik |
|--------------|---------------|----------------|
| Sapi         | 705 Ekor      | 524 Orang      |
| Kambing      | 324 Ekor      | 242 Orang      |
| Ayam Petelur | 15.000 Ekor   | 3 Orang        |

#### c. Sumber Daya Air

- Potensi air irigasi

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Waduk/Dam | 1 Unit           |
| Sungai    | Debit 5 M3/dtk   |
| Mata Air  | Debit 0.5 M3/dtk |

- Air Minum

| Jenis       | Jumlah (unit) | Pemanfaat (KK) | Jumlah rusak (unit) |
|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Sumur Gali  | 42            | 169            | 3                   |
| Pipanisasi  | 11            | 750            | 2                   |
| Sumur pompa | 2             | 200            | -                   |

#### d. Perikanan

Di Desa Serang untuk potensi perikanan terdapat perikanan darat dan perikanan laut, antara lain :

- Perikanan darat (air payau)

| Jenis        | Luas  | Produksi      |
|--------------|-------|---------------|
| Tambak Udang | 30 Ha | 100 ton/tahun |

- Perikanan Laut

| Jenis ikan    | Produksi      |
|---------------|---------------|
| Tuna          | 1 ton/tahun   |
| Udang/Lobster | 0,5 ton/tahun |
| Tengiri       | 1,5 ton/tahun |
| Teri          | 2,3 ton/tahun |
| Tongkol       | 1,2 ton/tahun |

Perikanan Laut yang ada belum digali dan di kelola dengan baik sehingga masyarakat yang bekerja di sektor ini sedikit sekali, apabila sumber daya alam ini dikembangkan dengan baik maka dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Desa Serang akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

e. Wisata Alam

Potensi Wisata Desa Serang adalah Wisata Pantai/Bahari yang merupakan potensi yang luar biasa namun selama ini belum di kembangkan dan dikelola secara optimal karena pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Wisata Pantai Serang yang mempunyai garis pantai panjang dan alam pantai yang eksotik apabila di kembangkan menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Blitar akan bisa berdampak kesejahteraan masyarakat.

f. Perkebunan dan Kehutanan

Desa Serang terletak di wilayah sekitar hutan potensi kehutanan (dalam pengelolaan Perhutani.red) sangatlah besar untuk bisa di gali dan di kembangkan, namun dikarenakan terjadi perambahan hutan pada awal reformasi maka kondisi sekarang gundul, saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian. Potensi kehutanan ini apabila dapat segera di kembalikan lagi sebagai fungsinya

maka akan berdampak pada ekonomi yang berkelanjutan, dengan cara reboisasi yang mana untuk hutan lindung ditanami komoditas yang bisa diambil hasilnya seperti tanaman Pala, buah-buahan yang pohonnya keras dan untuk hutan produksi bisa ditanami pohon produktif seperti Jati dan Sengon dengan sistem bagi hasil dengan masyarakat.

g. Pertambangan/Bahan Galian

Desa Serang terdapat potensi bahan galian yang meliputi Batu Marmer, Batu Kapur, Batu Onyx, dan batu kali yang dapat digali dan dikembangkan.

h. Industri Kecil

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - Pemilik usaha kerajinan             | = 12 orang |
| - Pemilik usaha industri rumah tangga | = 8 orang  |
| - Buruh industri kecil                | = 55 Orang |

### 3.1.2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumberdaya manusia yang ada di desa Serang masih perlu digali, berbagai tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, industri rumah tangga, pariwisata, kerajinan dan perikanan laut serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi. Potensi-potensi ini masih perlu digali dan dimaksimalkan, karena hingga saat ini potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal.

Selain potensi diatas, banyak juga potensi sumberdaya manusia lainnya yang diantaranya :

1. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi serta Perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.

Jumlah penduduk usia produktif di desa Serang cukup banyak dan rata-rata memiliki etos kerja yang cukup tinggi.

2. Kemampuan bertani dan melaut (nelayan) yang diwariskan secara turun-temurun

Mayoritas penduduk desa Serang merupakan petani, pekebun, nelayan, peternak dengan kemampuan yang diwariskan secara turun-temurun.

Hal ini merupakan salah satu potensi tersendiri yang dapat dikembangkan agar pemanfaatan lahan pertanian maupun pekarangan dapat ditingkatkan secara optimal

3. Budaya rembug desa dan gotong royong.

Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan serta masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. sebagai salah satu bentuk partisipasi warga dalam pembangunan desa

4. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.

Masalah kesehatan menjadi perhatian bagi masyarakat desa Serang. Di desa Serang terdapat kader-kader kesehatan yang siap untuk melaksanakan dan memfasilitasi informasi-informasi kesehatan. Terdapat 1 orang Bidan ; 25 orang kader posyandu balita; 5 orang kader posyandu lansia, 1 orang mantri kesehatan, dan 2 orang dukun beranak. Selain itu di Desa Serang juga terdapat 5 posyandu balita dan 1 posyandu lansia yang secara rutin melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap kesehatan balita dan lansia di wilayah desa Serang.

5. Adanya penduduk yang mempunyai ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu dan kerajinan rumah tangga.

### 3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Desa Serang yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Serang I membawahi 2 RW terdiri dari 9 RT, Dusun Serang II membawahi 3 RW terdiri dari 11 RT dan Dusun Serang III membawahi 2 RW terdiri dari 6 RT memiliki beberapa lembaga yang saling bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.

Potensi kelembagaan / organisasi yang ada di desa Serang antara lain sebagai berikut :

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN PEMERINTAH DESA

-Jumlah aparat pemerintahan Desa 7 orang



| No | Nama        | Jabatan                    | Pendidikan | Keterangan |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|
| 1  | DWI HANDOKO | Kepala Desa                | SMA        | Aktif      |
| 2  |             | Sekretaris Desa            |            | Kosong     |
| 3  |             | Kepala Urusan Pemerintahan |            | Kosong     |
| 4  |             | Kepala Urusan Keuangan     |            | Kosong     |
| 5  | SABARUDIN   | Kepala Urusan Umum         | SMP        | Aktif      |
| 6  | SUMIDI      | Kepala Urusan Pembangunan  | SMA        | Aktif      |
| 7  | YENI NURIDA | Kaur Kesra                 | SMA        | Aktif      |
| 8  | S U K R I   | Kasun Serang I             | SMP        | Aktif      |
| 9  | S U R I     | Kasun Serang II            | SMP        | Aktif      |
| 10 | HARIANTO    | Kasun Serang III           | SMP        | Aktif      |

#### B. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| No | Nama              | Jabatan     | Pendidikan | Keterangan |
|----|-------------------|-------------|------------|------------|
| 1  | SUYITNO,Spd       | Ketua       | Sarjana    |            |
| 2  | SISWANTO          | Wakil Ketua | Sarjana    |            |
| 3  | JEMARI            | Sekretaris  | Sarjana    |            |
| 4  | NYONO             | Anggota     | Sarjana    |            |
| 5  | BONARI            | Anggota     | SMA        |            |
| 6  | NUNUNG            | Anggota     | SMP        |            |
| 7  | DODIK<br>PRASETYO | Anggota     | SMA        |            |
| 8  | WAGIRIN           | Anggota     | SMP        |            |
| 9  | BUDIONO           | Anggota     | SMA        |            |
| 10 | PODO              | Anggota     | SMP        |            |
| 11 | SUTINI            | Anggota     | SMP        |            |

#### C. LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LPMD)

| No | Nama                | Jabatan         | Pendidikan | Keterangan |
|----|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 1  | BUDIONO             | Ketua           | SD         |            |
| 2  | JOKO<br>WIDODO      | Sekretaris      | SMP        |            |
| 3  | SUKRIANTO           | Bendahara       | SMP        |            |
| 4  | M. GIANT<br>ULINUHA | Seksi Keagamaan | SMP        |            |
| 5  | YULIATINA           | Seksi PKK dan   | SMA        |            |

|    |               |   |     |  |
|----|---------------|---|-----|--|
|    |               | Pemberdayaan Perempuan  |     |  |
| 6  | LISDIANTO     | Seksi Karang Taruna dan Kepemudaan                            | SMA |  |
| 7  | SUSENO        | Seksi Keamanan dan Perlindungan Masyarakat                    | SD  |  |
| 8  | PAID          | Seksi Seni Budaya dan Olahraga                                | SD  |  |
| 9  | SUKIRNO       | Seksi Pertanian dan Perikanan Laut                            | SMP |  |
| 10 | HASYIM ASYARI | Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana | SMP |  |

## D. LEMBAGA EKONOMI

| No | Lembaga         | Jumlah | Kegiatan                                   |
|----|-----------------|--------|--|
| 1  | Koperasi wanita | 1      | Simpan Pinjam                              |
| 2  | BUMDes          | 1      | Simpan Pinjam, Pasar Desa, Air Minum Desa. |

## E. LEMBAGA PENDIDIKAN

| No | Nama                     | Jumlah | Status | Kepemilikan     | eterangan |
|----|--------------------------|--------|--------|-----------------|-----------|
| A. | <b>Pendidikan formal</b> |        |        |                 |           |
| 1. | SD                       | 3      | Negeri | Pemerintah      |           |
| 2. | SMP                      | 1      | Negeri | Pemerintah      |           |
| 3. | SMA                      | -      |        |                 |           |
| 4. | TK                       | 3      |        | Pemerintah Desa |           |
| 5. | PAUD                     | 1      |        | Pemerintah Desa |           |
| B. | <b>Pendidikan formal</b> |        |        |                 |           |

|    | keagamaan |    |  |                |  |
|----|-----------|----|--|----------------|--|
| 4. | Madin/TPA | 11 |  | Lembaga Masjid |  |

## F. LEMBAGA ADAT

| No | Jenis kegiatan adat                  | Keterangan  |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Upacara Adat Perkawinan              | Temu Manten   |
| 2  | Upacara Adat Kematian                | Genduri/Selamatan<br>7,40,100,1000 hari,<br>pendak 1 dan 2. |
| 3  | Upacara Adat Kelahiran               | Tingkeban, Pitonan  |
| 4  | Upacara Adat dalam bercocok tanam    | Metik   |
| 5  | Upacara Adat bidang perikanan/laut   | Petik Laut  |
| 6  | Upacara adat dalam Pembangunan rumah | Selamatan   |
| 7. | Upacara Adat Bersih Desa             | Ruwat Murwakala   |
| 8. | Upacara Adat Desa Larung Sesaji      | Larung Sesaji 1 Suro  |

## G. KELOMPOK MASYARAKAT

| No | Lembaga                                   | Jumlah      | egiatan                                |
|----|---|-------------|--|
| 1  | Kelompok Tani                             | 19 Kelompok | ertanian                               |
| 2  | PKK                                       | 1 Lembaga   | emberdayaan anita                      |
| 3  | Karang Taruna                             | 1 Lembaga   | emberdayaan emuda                      |
| 4  | Posyandu Balita                           | 5 Pos       | elayanan esehatan Balita               |
| 5  | Gabungan Kelompok Tani Desa (Gapoktandes) | 1 Lembaga   | ertanian                               |
| 6  | Dewan Kesenian dan Budaya Desa            | 1 Lembaga   | elestarikan Seni radisi dan udaya Jawa |

|    |  |            |                                     |
|----|--|------------|-------------------------------------|
| 7  | Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)        | 1 Kelompok | engembangkan ariwisata Pantai erang |
| 8  | Nahdatul Ulama (NU)                      | 1 Lembaga  | eagamaan                            |
| 9  | Fatayat NU                               | 1 Lembaga  | eagamaan                            |
| 10 | Muslimat NU                              | 1 Lembaga  | eagamaan                            |
| 11 | Posyandu Lansia                          | 1 Lembaga  | elayanan esehatan Lansia            |
| 12 | Badan Kerjasama Desa                     | 1 lembaga  | Kerjasama Antar esa                 |
| 13 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 1 lembaga  | cwaspaan dini asyarakat.            |

#### H. LEMBAGA KEAMANAN

##### 1. Hansip dan Linmas

- Keberadaan Hansip dan Linmas Ada
- Jumlah anggota Hansip 20 orang
- Jumlah anggota Satgas Linmas 20 orang
- Pelaksanaan SISKAMLING Tidak Ada
- Jumlah Pos Kamling 3 buah (Tidak Aktif)

##### 2. Satpam Swakarsa

- Keberadaan SATPAM SWAKARSA Tidak Ada

##### 3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI - POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS

- Mitra Koramil / TNI Ada
  - o Jumlah anggota 1 Orang
  - o Kegiatan : Mengadakan pembinaan terhadap keamanan di lingkungan masyarakat
- Babinkamtibmas / POLRI Ada
  - o Jumlah anggota 1 Orang

Adapun hubungan antar lembaga maupun antara lembaga dan masyarakat yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
2. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
3. Adanya kelompok-kelompok masyarakat di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan serta lainnya.

### 3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM-Desa Serang yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan redaksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.

Perumusan masalah secara umum di bedakan menjadi 2 ( dua ), yaitu masalah skala desa sesuai kewenangan desa dan supra desa atau di luar urusan kewenangan desa.

Berikut ini di sampaikan perumusan masalah dengan penyajian secara kualitatif, skala desa sesuai dengan kewenangan yang di miliki desa dan supra desa yang keseluruhannya berasal dari masyarakat dan musyawarah pembangunan.

### **3.2.1. Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam bidang pemerintahan desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Serang antara lain :

1. Kemampuan penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam tata kelola manajemen Pemerintahan Desa.
2. Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang (terdapat kekosongan perangkat desa, IT belum memadai, ATK dan perlengkapan kantor lainnya.)
3. Pendapatan asli desa rendah, sumber pendapatan desa belum tergali.
4. Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
5. Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa.
6. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran
7. Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa.
8. Belum adanya penyusunan tata ruang desa dan batas desa.

### **3.2.2 Masalah Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Serang antara lain :

1. Pelayanan dasar dasar, antara lain :
  - a. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai
  - b. Lingkungan tempat tinggal belum tertata dengan baik, termasuk MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
  - c. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau.
  - d. Lingkungan padat pemukiman, masalah sampah yang belum terkelola dan dimanfaatkan dengan baik.
  - e. Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni.
  - f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

- g. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, untuk pendidikan dasar dan pendidikan pra-sekolah/pendidikan usia dini.
  - h. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  - i. Minimnya jumlah dan kemampuan guru didik untuk pendidikan usia dini dan sekolah dasar.
  - j. belum adanya taman bacaan masyarakat.
  - k. belum adanya balai latihan/kegiatan belajar masyarakat.
  - l. Perlu meningkatkan posyandu, polindes untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
2. Sarana dan prasarana desa , antara lain;
- a. Sarana dan prasana kantor desa belum memadai perlu pengembangan.
  - b. Sarana jalan desa dan lingkungan masih belum memadai.
  - c. Perlunya pemeliharaan dan peningkatan untuk prasarana jalan yang sudah ada.
  - d. Belum ada saluran drainase air di kanan dan kiri jalan.
  - e. Belum adanya penerangan jalan umum.
  - f. Kekurangan air bersih disaat musim kemarau sehingga perlu sarana air yang memadai.
  - g. Sarana dan prasarana pertanian belum mencukupi antara lain Saluran irigasi, jalan usaha tani dan alat-alat pertanian modern.
  - h. Belum adanya tempat pendaratan perahu, sehingga nelayan terkendala untuk bisa mencari tangkapan ikan laut secara rutin.
  - i. Hasil tangkapan ikan belum bisa dikelola secara optimal karena tempat pelelangan ikan belum ada.
  - j. Lapangan desa yang ada belum memadai.
3. Pengembangan ekonomi lokal, antara lain :
- a. Belum berkembangnya lembaga perekonomian (BUMDES, Koperasi) karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus dalam pengelolaan modal.

- b. Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum terkelola dengan baik.
  - c. Kegiatan usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha.
  - d. Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar.
  - e. Sarana dan prasarana pasar desa rusak dan belum terkelola dengan baik.
  - f. Kurangnya bantuan modal untuk usaha tani dan ekonomi produktif.
  - g. Belum adanya pembinaan terhadap usaha tani dan ekonomi produktif.
  - h. Kapasitas kemampuan tani dan nelayan masih kurang.
  - i. Sarana perahu nelayan masih belum memadai.
  - j. Pengelolaan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara ekonomis belum berskala produktif.
  - k. Pengelolaan wisata pantai yang belum melibatkan semua stakeholder.
  - l. Adanya tarik ulur kewenangan pengelolaan wisata pantai antara pemda, perhutani, desa dan lembaga-lembaga lain.
  - m. Sarana prasarana wisata pantai belum ada dan masih jauh dari memadai untuk menjadi destinasi pariwisata
  - n. Lahan perkebunan masyarakat banyak yang belum dimanfaatkan dan terkelola dengan optimal.
  - o. Kurangnya pengetahuan pemanfaatan lahan perkebunan untuk tanaman yang produktif dan buah-buahan yang kompetitif dipasar.
  - p. Lahan hutan rakyat maupun hutan lindung dan produksi yang gundul di wilayah desa belum secara optimal dikelola dengan baik
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa, antara lain ;
- a. Hutan gundul sehingga segera mungkin diadakan reboisasi.
  - b. Debit mata air setiap tahun menurun.
  - c. Daerah aliran sungai mengalami pendangkalan.
  - d. Belum adanya perlindungan satwa langka perikanan seperti penyu dll.
  - e. Kawasan pantai perlu adanya pengembangan penanaman bakau.
  - f. Pengelolaan persampahan di desa belum ada.



- g. Belum adanya pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa.
- h. Kelompok pelestarian lingkungan yang terbentuk belum optimal.

### **3.2.3 Masalah Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Serang antara lain :

1. Tidak aktifnya Pos Keamanan Lingkungan.
2. Diperlukannya kegiatan pembinaan kepada kelembagaan desa dan masyarakat untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, untuk mengawal tercapainya visi dan misi desa.
3. Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan, karena banyak kasus kriminal, dan ketidakharmonisan hubungan antar warga; mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.
4. Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja.
5. Semakin menipisnya nilai-nilai kegotong-royongan di masyarakat.
6. Belum memadainya Sarana dan prasarana olah raga.
7. Belum adanya pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

### **3.2.4 Masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Serang antara lain :

1. Banyak ditemui kegiatan kelompok masyarakat belum terkoordinasi, sehingga belum terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
2. Belum adanya penguatan kapasitas usaha ekonomi masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, pemuda dan lain kelompok ekonomi lainnya.
3. Kondisi lingkungan sosial dan fisik belum menjadi prioritas bahkan terdapat sikap tidak peduli dari masyarakat, perlu pembinaan dan pendampingan melalui pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan hidup.

### **3.2.5 Masalah Supra Desa.**

Mengingat desa berada dalam wilayah kabupaten, maka perencanaan pembangunan desa harus menyesuaikan dan bersinergi dengan dengan perencanaan pembangunan kabupaten dalam hal ini RPJM

Kabupaten. Perumusan masalah supra desa di lakukan dalam kerangka pendekatan dan pengertian bahwa masalah tersebut berada di desa dan atau mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap desa. Adapun perumusan masalah supra desa yang teridentifikasi Desa Kaligambir dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan transportasi barang dan jasa belum optimal dan lancar, sehubungan dengan jalan utama yang yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan dalam bergelombang dan rusak yang mengakibatkan distribusi barang terkendala khususnya pengangkutan hasil hasil pertanian keluar desa.
2. Kegiatan pendidikan khususnya sekolah dasar kurang optimal berkaitan dengan terbatasnya ruang kelas dan kondisi ruangan yang memerlukan perbaikan.
3. Kegiatan pelayanan kesehatan belum optimal di sebabkan oleh tidak tersedianya tenaga bidan yang menetap di desa.

Produksi pertanian belum optimal di sebabkan irigasi teknis tidak dapat memenuhi kebutuhan air akibat kerusakan saluran air sekunder.

**Lampiran 7** Dokumen Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Serang**BAB IV****RENCANA PENGEMBANGAN DESA WISATA****4.1 Strategi Pengembangan Desa Wisata.**

Pengembangan desa wisata Serang, berdasarkan potensi obyek daya tarik wisata dan kesiapan masyarakat, dapat dilakukan melalui dua strategi. Strategi pertama yaitu merancang dan mengoptimalkan berbagai produk wisata yang sudah ada maupun belum ada seperti misalnya program paket – paket wisata. Strategi kedua yaitu meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam mengelola wisata, karena dalam pengembangan desa wisata selain peran pemerintah desa haruslah masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengelolaannya.

Ada paket program dan produk ekowisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan diantaranya paket pelepasan dan edukasi konservasi penyu, paket trekking menyusuri keindahan pantai Serang dan sekitarnya, serta beberapa paket seperti melihat sunset, camping ground, kesenian desa, kerajinan cinderamata, batik, kuliner dari ikan laut yang bisa di ikuti oleh para pengunjung, seperti berpartisipasi dalam pembuatan cinderamata dari tanah liat dan kaulin bersama pengrajin, mengolah kuliner ikan laut atau menari jaranan dan langen beksan. Paket wisata lainnya tentu akan terus dikembang sebagai inovasi daya tarik wisata.

Strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kompetensi masyarakat dalam mengelola wisata. Pengembangan Desa Wisata ini dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh Sumber daya manusia yang kompeten.

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bisa dilakukan pelatihan masyarakat untuk dikaryakan menjadi pemandu wisata, pengelola pondok wisata (home stay), penyedia konsumsi bagi wisatawan, serta pelatihan penduduk untuk mengolah kerajinan tangan, mengolah ikan laut. Hal lain yang harus dilakukan meningkatkan pengelolaan manajemen bagi kelompok sadar wisata dan kelompok – kelompok kerja sebagai pengelola desa wisata agar pengelolaan desa wisata bisa berjalan dengan konsisten serta pelatihan-pelatihan lain untuk menunjang berjalannya pengembangan desa wisata.

#### 4.2 Kelembagaan dan Tata Kelola.

Kelembagaan dalam pengelola desa wisata adalah suatu keharusan sehingga Pemerintah Desa Serang bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bina Usaha Mandiri telah membentuk Unit Usaha Desa Wisata yang pelaksana pengelolaan dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Serang yang merupakan lembaga pengelola semua kegiatan desa wisata. Dengan sistem pengelolaan secara kolektif antara kelompok – kelompok kerja yang ada, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing dalam menjalankannya. Untuk menjaga kesolidan dan kekompakan setiap satu bulan sekali ada pertemuan rutin.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), merupakan lembaga yang menjadi pusat manajemen dari seluruh kegiatan yang ada dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh kelompok-kelompok kerja.

Struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata “ Dewa Serang “ terdiri dari :

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Pelindung                                | : | DWI HANDOKO ( Kepala Desa ). |
| Penasehat                                | : | SUYITNO,S.Pd ( Ketua BPD).   |
| Ketua                                    | : | YUDI KRISDIANTORO,SE         |
| Wakil Ketua                              | : | SUYADI                       |
| Sekretaris                               | : | RUDI SETYAWAN                |
| Bendahara                                | : | SUHARTONO                    |
| Seksi – Seksi                            | : |                              |
| ✓ Keamanan dan Ketertiban                | : | SUSENO                       |
| ✓ Kebersihan dan Keindahan               | : | RIYANTO                      |
| ✓ Daya Tarik Wisata dan Kenangan         | : | ANANG KHOLIPIN               |
| ✓ HUMAS dan Pengembangan SDM             | : | LISDIANTO                    |
| ✓ Pengembangan Usaha                     | : | GATOT WIBOWO                 |
| Pokja – Pokja                            | : |                              |
| ▪ Pokja Pantai Serang                    | : | MISYADI                      |
| ▪ Pokja Goa Kedungkrombang               | : | SUGIONO                      |
| ▪ Pokja Konservasi Penyu                 | : | SARDIANTO                    |
| ▪ Pokja Pelestarian Sumberdaya Perikanan | : | SUJARWO                      |
| ▪ Pokja Kerajinan dan Cenderamata        | : | ANDRIANA                     |
| ▪ Pokja Homestay dan Guide               | : | H. D. ANGGARA                |
| ▪ Pokja Seni dan Budaya                  | : | SUWANTO                      |

- Pokja Nelayan & SAR Laut : SUTARMAN

#### 4.3 Program Kerja

Program kerja terbagi menjadi tiga skala prioritas yaitu :

a. Optimalisasi Daya Tarik Wisata dan sarana pendukung meliputi :

- Meningkatkan kegiatan penciptaan Sapta Pesona sebagai kunci dari keberhasilan dari keberlanjutan wisata.
- Mengoptimalkan produk wisata yang sudah di lakukan yaitu Konservasi Penyu dikembangkan menjadi wisata edukasi.
- Penyusunan Master Plan Desa
- Penyusunan Peta Desa Wisata Serang.
- Penyusunan Zona Desa Wisata Serang .
- Revitalisasi rumah penduduk kawasan Pantai Serang menjadi rumah bercirikan jawa dan sebagai homestay.
- Merintis Industri Kerajinan Batu Onyx.
- Merintis Industri Kreatif : Souvenir/Cinderamata.
- Pengembangan Pasar Ikan berbasis pariwisata.
- Pengembangan Industri Olahan Ikan Laut.
- Pembangunan MCK.
- Pembangunan Pusat Informasi Wisata.
- Pembangunan Gardu Pantau di Kawasan Pantai Serang.
- Revitasasi warung makan dengan penataan zona.
- Pengadaan Alat kesenian Jaranan.
- Pembuatan Paket Wisata dan Optimalisasi Promosi.
- Menyelenggarakan kegiatan Serang Festival sebagai agenda tahunan.
- Membangun sanggar seni dan panggung seni.
- Membangun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia.

- Pelatihan Kelompok Sadar Wisata, meliputi manajemen dan sistem pengelolaan desa wisata.
- pelatihan masyarakat pengetahuan bahasa asing sebagai pemandu wisata, pengelola pondok wisata (home stay), penyedia konsumsi bagi wisatawan, serta pelatihan penduduk untuk mengolah kerajinan tangan, mengolah ikan laut.










BUKU KAS PEMBANTU  
BUM DES BINA USAHA MANDIRI DESA SERANG  
TAHUN 2017

Unit Usaha : Pengelolaan Desa Wisata dan Pariwisata

| NO | TANGGAL   | URAIAN                 | NO BUKTI | PEMASUKAN  | PENGELUARAN | SALDO     |
|----|-----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------|
| 1  | 1/10/2017 | Saldo bulan lalu       |          | 43,075,000 | 39,816,500  | 3,258,500 |
| 2  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 3  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 4  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 5  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 6  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 7  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 8  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
| 9  |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
|    |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
|    |           |                        |          |            |             | 3,258,500 |
|    |           | Saldo bulan lalu       |          | 43,075,000 | 39,816,500  | 3,258,500 |
|    |           | Saldo bulan ini        |          | 0          | 0           | 0         |
|    |           | Saldo sampai bulan ini |          | 43,075,000 | 39,816,500  | 3,258,500 |

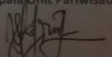
Serang, 30 Oktober 2017  
Kepala Unit Pariwisata  
  
YUDI KRISDIANTORO, SE

Bulan Oktober

BUKU KAS PEMBANTU  
BUM DES BINA USAHA MANDIRI DESA SERANG  
TAHUN 2017

Unit Usaha : Pengelolaan Desa Wisata dan Pariwisata

| NO | TANGGAL    | URAIAN                                     | NO BUKTI | PEMASUKAN  | PENGELUARAN | SALDO     |
|----|------------|--|----------|------------|-------------|-----------|
| 1  | 1/10/2017  | Saldo bulan lalu                           |          | 43,075,000 | 39,816,500  | 3,258,500 |
| 2  | 7/11/2017  | Beli semen 3 sak @ 54000, paku 1kg @ 18000 |          |            | 180,000     | 3,078,500 |
| 3  | 11/11/2017 | Terima dari penataan kendaraan             |          | 1,500,000  |             | 4,578,500 |
| 4  | 11/11/2017 | bayar cetak karcis penataan kendaraan      |          |            | 600,000     | 3,978,500 |
| 5  |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
| 6  |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
| 7  |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
| 8  |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
| 9  |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
|    |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
|    |            |  |          |            |             | 3,978,500 |
|    |            | Saldo bulan lalu                           |          | 43,075,000 | 39,816,500  | 3,258,500 |
|    |            | Saldo bulan ini                            |          | 1,500,000  | 780,000     | 720,000   |
|    |            | Saldo sampai bulan ini                     |          | 44,575,000 | 40,596,500  | 3,978,500 |

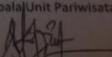
Serang, 30 Nopember 2017  
Kepala Unit Pariwisata  
  
YUDI KRISDIANTORO, SE

Bulan Nopember

BUKU KAS PEMBANTU  
BUM DES BINA USAHA MANDIRI DESA SERANG  
TAHUN 2017

Unit Usaha : Pengelolaan Desa Wisata dan Pariwisata

| NO | TANGGAL    | URAIAN                         | NO BUKTI | PEMASUKAN  | PENGELUARAN | SALDO      |
|----|------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 1  | 1/12/2017  | Saldo bulan lalu               |          | 44,575,000 | 40,596,500  | 3,978,500  |
| 2  | 5/12/2017  | Terima dari penataan kendaraan |          | 1,500,000  |             | 5,478,500  |
| 3  | 20/12/2017 | Terima dari penataan kendaraan |          | 1,200,000  |             | 6,678,500  |
| 4  | 23/12/2017 | setor ke bendahara Bumdes      |          |            | 4,000,000   | 2,678,500  |
| 5  |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
| 6  |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
| 7  |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
| 8  |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
| 9  |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
|    |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
|    |            |                                |          |            |             | 2,678,500  |
|    |            | Saldo bulan lalu               |          | 44,575,000 | 40,596,500  | 3,978,500  |
|    |            | Saldo bulan ini                |          | 2,700,000  | 4,000,000   | -1,300,000 |
|    |            | Saldo sampai bulan ini         |          | 47,275,000 | 44,596,500  | 2,678,500  |

Serang, 31 Desember 2017  
Kepala Unit Pariwisata  
  
YUDI KRISDIANTORO, SE

Bulan Desember

## Lampiran 9 Anggaran pembangunan gapura oleh Dinas Parbudpora Kab. Blitar

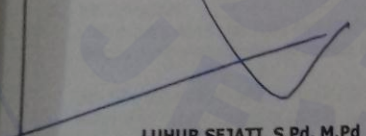

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 Jl. A. Yani Nomor 11, Telp. 0342 801025  
**BLITAR**

---

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>  | SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR<br>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)<br>NOMOR : 027/03.22/PPK/APBDP/Kons.Prc/409.103/2016<br>TANGGAL : 14 Oktober 2016                 |                     |
| PAKET PEKERJAAN :<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAPURA MASUK<br>DESTINASI WISATA PANTAI SERANG<br>LOKASI : KECAMATAN PANGGUNGREJO | SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG<br>NOMOR : 027/02/PL/Kons/409.014/2016<br>TANGGAL : 04 Oktober 2016<br>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN<br>NOMOR : 027/07/PL/Kons/409.014/2016<br>TANGGAL : 11 Oktober 2016 |                     |
| SUMBER DANA : APBDP TAHUN ANGGARAN 2016  |   |                     |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (Tujuh) hari kalender<br>( Tanggal : 17 s/d 23 Oktober 2016 )                                  |   |                     |
| <b>NILAI PEKERJAAN</b>   |   |                     |
| No   | Uraian  | Total Biaya (Rp.)   |
| I  | Biaya Langsung Personil   | 3.259.000,00        |
| II   | Belanja Langsung Non Personil   | 2.020.000,00        |
|  |   | <b>Jumlah</b>       |
|  |   | <b>5.279.000,00</b> |
|  |   | <b>PPN 10%</b>      |
|  |   | <b>527.900,00</b>   |
|  |   | <b>Total</b>        |
|  |   | <b>5.806.900,00</b> |
|  |   | <b>Pembulatan</b>   |
|  |   | <b>5.800.000,00</b> |

*Terbilang : Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI:** Pengisian hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (dua puluh dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

|  |  |
|--|--|
| KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR<br>SELAKU<br>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN<br><br><br><b>LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd</b><br>Pembina Tk. I<br>NIP. 19630107 198603 1 010 | Blitar, 14 Oktober 2016<br><b>CV. TERATE MANUNGAL</b><br><br><b>MISKAN HADI PRASETYO, ST</b><br>Direktur |
|--|--|

Perencanaan pembangunan gapura masuk destinasi wisata Pantai Serang






**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 Jl. A. Yani Nomor 11, Telp. 0342 801025  
**BLITAR**

---

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <p><b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b></p> <p>PAKET PEKERJAAN :<br/>                 PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAPURA MASUK<br/>                 DESTINASI WISATA PANTAI SERANG<br/>                 LOKASI : KECAMATAN PANGGUNGREJO</p>  | <p>SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR</p> <p><b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b><br/>                 NOMOR : 027/03.28/PPK/APBD/Kons.Spv/409.103/2016<br/>                 TANGGAL : 04 Nopember 2016</p> <p><b>SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG</b><br/>                 NOMOR : 027/02/PL/Kons/409.014/2016<br/>                 TANGGAL : 25 Oktober 2016</p> <p><b>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN</b><br/>                 NOMOR : 027/07/PL/Kons/409.014/2016<br/>                 TANGGAL : 01 Nopember 2016</p> |                                |
| SUMBER DANA : APBDP TAHUN ANGGARAN 2016  |   |                                |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender<br>( Tanggal : 7 Nopember s/d 21 Desember 2016 )   |   |                                |
| <b>NILAI PEKERJAAN</b>   |   |                                |
| No   | Uraian  | Total Biaya (Rp.)              |
| I  | Biaya Langsung Personil   | 2.071.875,00                   |
| II   | Belanja Langsung Non Personil   | 1.482.000,00                   |
|  |   | <b>Jumlah</b> 3.553.875,00     |
|  |   | <b>PPN 10%</b> 355.387,50      |
|  |   | <b>Total</b> 3.909.262,50      |
|  |   | <b>Pembulatan</b> 3.900.000,00 |
| Terbilang : Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah   |   |                                |
| <p><small>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (dua puluh dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.</small></p> |   |                                |
| <p>KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR<br/>                 SELAKU<br/>                 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd</b><br/>                 Pembina Tk. I<br/>                 NIP. 19630107 198603 1 010</p>  | <p style="text-align: right;">Blitar, 04 Nopember 2016<br/> <b>CV. TRISULA KONSULINDO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>KHOLIL JUNAIDI, S.Pd</b><br/>                 Direktur</p>  |                                |

Pengawasan pembangunan gapura masuk destinasi wisata Pantai Serang


**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 Jln. Ahmad Yani No. 11 Telp. (0342) 801025 Blitar  
**BLITAR**

|   |  |  |
|---|--|--|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  | SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR<br>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)<br>NOMOR : 027/03/PA-PPK/DPOKP.004/PL/K/APBD-P/409.103/2016<br>TANGGAL : 07 November 2016                              |  |
| PAKET PEKERJAAN :<br>PEMBANGUNAN/REHABILITASI<br>GAPURA MASUK DESTINASI<br>WISATA PANTAI SERANG<br>LOKASI :<br>DESA SERANG KECAMATAN<br>PANGGUNGREJO KABUPATEN<br>BLITAR  | SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG<br>NOMOR : 027/08/DPOKP.004/PL/K/409.014/2016<br>TANGGAL : 27 Oktober 2016<br><br>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN<br>NOMOR : 027/13/DPOKP.004/PL/K/409.014/2016<br>TANGGAL : 02 November 2016 |  |
| SUMBER DANA : APBD-P TAHUN ANGGARAN 2016  |  |  |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender<br>(Mulai tanggal : 07 November 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016)<br>WAKTU PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender<br>(Mulai tanggal : 22 Desember 2016 s/d tanggal 19 Juni 2017)   |  |  |
| <b>NILAI PEKERJAAN</b>  |  |  |
| NO  | URAIAN   | TOTAL BIAYA (Rp.)  |
| 1.  | PEKERJAAN PERSIAPAN  | Rp. 1.921.410,30   |
| 2.  | PEKERJAAN TANAH  | Rp. 550.849,09   |
| 3.  | PEKERJAAN BETON  | Rp. 6.774.194,83   |
| 4.  | PEKERJAAN PASANGAN DINDING   | Rp. 807.920,00   |
| 5.  | PEKERJAAN PLESTERAN  | Rp. 3.404.295,00   |
| 6.  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI   | Rp. 9.977.084,94   |
| 7.  | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT  | Rp. 3.868.054,50   |
| 8.  | PEKERJAAN PENUTUP ATAP   | Rp. 11.402.975,58  |
| 9.  | PEKERJAAN KERANGKA ATAP  | Rp. 43.715.767,51  |
| 10.   | PEKERJAAN PINTU & JENDELA  | Rp. 9.181.200,00   |
| 11.   | PEKERJAAN KUNCI DAN KACA   | Rp. 1.657.894,42   |
| 12.   | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK  | Rp. 1.346.500,00   |
| 13.   | PEKERJAAN PENGECATAN   | Rp. 4.030.583,17   |
|   |  | Jumlah Rp. 98.638.729,34   |
|   |  | PPN 10% Rp. 9.863.872,93   |
|   |  | Total Rp. 108.502.602,27   |
|   |  | Pembulatan Rp. 108.500.000,00  |
| Terbilang : Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah   |  |  |
| INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA/KPA/PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. |  |  |
| KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA<br>KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA<br>KABUPATEN BLITAR<br>Selaku<br>PEMBUAT KOMITMEN   |  | Blitar, 07 November 2016<br>CV. TUJUH TUJUH  |
| <br>6000<br>RUPIAH<br>DR. H. H. SEJATI, S.Pd, M.Pd<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 19630107 198603 1 010  |  | <br>MUHAMMAD ABDUL LATIF<br>Direktur |

Pembangunan/Rehabilitasi gapura masuk destinasi wisata Pantai Serang

Lampiran 10 Dokumentasi kondisi Wisata Pantai Serang



Gapura selamat datang kawasan wisata Pantai Serang



Warung-warung di kawasan Pantai Serang



Gazebo di kawasan Pantai Serang



Kegiatan konservasi anak penyu (tukik)



Area parkir mobil

Lampiran 11 Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan pihak Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar



Wawancara dengan Kepala Desa Serang



Wawancara dengan Ketua POKDARWIS Dewa Serang



Wawancara dengan Ketua POKJA Pantai Serang



Wawancara dengan Sekretaris POKDARWIS Dewa Serang  
sekaligus POKJA Pantai Serang



Wawancara dengan Bendahara POKDARWIS Dewa Serang





Wawancara dengan Sie Parkir Pokja Pantai Serang



Wawancara dengan pemilik warung



Wawancara dengan pemilik penitipan sepeda motor dan homestay